

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis isi pada 37 teks berita kerusuhan Temanggung di Harian Suara Merdeka pada bulan Februari-Juli 2011, peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang dipaparkan dalam bab 1. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Harian Suara Merdeka menggunakan pendekatan jurnalisme damai dalam pemberitaan kerusuhan Temanggung.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa berita Harian Suara Merdeka tentang kerusuhan Temanggung belum menggunakan pendekatan jurnalisme damai. Hal ini dapat dilihat dari empat orientasi jurnalisme damai yang merupakan unit analisis dalam penelitian ini.

Orientasi pertama dalam pendekatan jurnalisme damai adalah orientasi perdamaian. Dilihat dari orientasi pada perdamaian, berita di Harian Suara Merdeka tentang kerusuhan Temanggung belum memenuhi semua kategori orientasi pada perdamaian. Hal ini dapat dilihat dari presentase analisis isi yang kurang dari 50% di setiap kategori. Ini pun juga terlihat dalam orientasi kedua pendekatan jurnalisme damai yaitu orientasi pada kebenaran. Hasil penelitian menemukan hanya 49% berita Harian Suara Merdeka terkait kerusuhan Temanggung yang mengungkap kebenaran dari semua sisi.

Selanjutnya, orientasi pendekatan jurnalisme damai yang ketiga adalah orientasi pada masyarakat. Dilihat dari orientasi pada masyarakat, berita Harian Suara Merdeka belum berorientasi pada masyarakat dengan presentase di bawah 50%. Secara teori, keberpihakan pada masyarakat mengarah pada perdamaian, sedangkan keberpihakan pada elit mengarah pada perang. Namun, dalam peristiwa kerusuhan Temanggung yang lebih banyak menyoroti orang-orang yang membawa perdamaian dari kalangan elit seperti: Presiden, Petinggi Kepolisian, Bupati, Ketua MUI, Komite DPD, dan Guru Besar tidak mengarahkan kerusuhan ke arah kekerasan lagi. Akan tetapi, mengajak masyarakat mengancam tindakan anarkis, mengajak masyarakat berpikir terbuka untuk mencari solusi dari berbagai peristiwa konflik yang terjadi.

Terakhir, orientasi pendekatan jurnalisme damai yang keempat adalah orientasi pada penyelesaian. Berita kerusuhan Temanggung di Harian Suara Merdeka dilihat dari orientasi pada penyelesaian juga belum memenuhi semua kategori orientasi ini. Namun, ada satu kategori yang sudah dipenuhi yaitu memuat upaya resolusi dengan presentase 57%.

B. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki saran buat media Harian Suara Merdeka juga untuk penelitian selanjutnya. Peneliti mengharapkan Harian Suara Merdeka menggunakan pendekatan jurnalisme damai dalam semua pemberitaan tentang konflik. Hal ini berhubungan dengan peran media sebagai *conflict resolution*, di mana media memberikan informasi juga media bergerak aktif dalam usaha perdamaian ketika meliput dan memberitakan peristiwa konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaff, Djafar H. 1991. *Jurnalistik Masa Kini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ekopriyono, Adr (Ed). 2005. 55 Tahun Mengabdikan Untuk Jawa Tengah. Semarang: Mascom Graphy.
- Ishwara, Luwi. 2005. Catatan-catatan Jurnalisme Dasar. Jakarta: Kompas.
- Kriyantono, Rakhmat. 2007. *Teknik Praktis Riset komunikasi*. Kencana: Jakarta.
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2006. *Sembilan Elemen Jurnalisme: Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan Publik*. Jakarta: Pantau
- Nurudin. 2009. *Jurnalistik Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pardede, J. Anton Pemiliana. 2007. *Meretas Jurnalisme Damai di Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Santana, Septiawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Setiati, Eni. 2005. *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*. Yogyakarta: Andi.
- Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadiria, H. 2006. *Jurnalistik Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syahputra, Iswandi. 2006. *Jurnalisme Damai Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Skrripsi dan Thesis:

- Nugraha, Adrianus Satrio. 2011. *Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan Masalah Klaim Malaysia atas Karya Seni Budaya Indonesia Tahun 2009*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Marcus, Henderina. 2012. *Berita Aksi Papua dalam Surat Kabar Harian Kompas (Studi Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Jurnalisme Damai Pemberitaan Aksi Kekerasan di Papua dalam Surat Kabar Harian Kompas Periode Oktober-Desember 2011)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wijayanti, Chory Angela. 2009. *Jurnalisme Damai dalam Berita televisi: Analisis isi pemberitaan Konflik Israel-Palestina di Liputan 6 SCTV*. Universitas Petra. Ilmu Komunikasi. Thesis.
(diakses tanggal 19 Maret 2012) dari
([www.http://dewey.petra.ac.id/jiunkpe_dg_14384_1.html](http://dewey.petra.ac.id/jiunkpe_dg_14384_1.html))

Berita

Suara Merdeka, 11 Maret 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/03/11/139588/Kasus-Temanggung-Disidangkan-di-Semarang>)

Suara Merdeka 15 Juni, 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/06/15/149642/Divonis-Setahun-Syihabudin-Laknat-Hakim>)

Suara Merdeka, 23 Juni 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/06/23/150415/Syihabudin-Dipindah-ke-Temanggung>)

Suara Merdeka, 10 Juni 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/06/10/149176/Perusuh-Temanggung-Dihukum-Ringan>)

Suara Merdeka, 11 Februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/11/136724/Rusuh-Temanggung-Bukan-Konflik-Agama>)

Suara Merdeka, 29 April 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/04/29/144938/Saksi-Melihat-Syihabudin-saat-Kerusuhan>)

Suara Merdeka, 25 Mei 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/05/25/147675/Syihabudin-Tuding-Baasyir-Terlibat-Kerusuhan-Temanggung>)

Suara Merdeka, 9 Februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/09/136544/Temanggung-Mulai-Tenang>)

Suara Merdeka, 12 februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/12/136798/Kapolres-dan-Dandim-Temanggung-Dicopot>)

Suara Merdeka, 9 Maret 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/03/09/139353/Lokasi-Sidang-Rusuh-Temanggung-Tunggu-Fatwa-Mahkamah-Agung>)

Suara Merdeka, 16 Februari 2011(diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/16/137098/Menteri-Agama-Dituntut-Mundur>)

Suara Merdeka, 1 Maret 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/03/01/138518/Dewan-Desak-Tersangka-Dipindah-ke-Temanggung>)

Suara Merdeka, 24 Februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012))
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/24/137966/Berkas-Rusuh-Temanggung-Segera-Dilimpahkan>)

Suara Merdeka, 22 Februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://www.suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2011/02/22/137671/Diduga-Ada-Rekayasa-Kasus-Cikeusik-dan-Temanggung>)

Suara Merdeka,1 Juni 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://www.suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2011/06/01/148423/Dituntut-Setahun-Sihabudin-Marah>)

Suara Merdeka, 16 Februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/16/137110/Dalang-Rusuh-Belum-Tersentuh>)

Suara Merdeka, 9 Februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/09/136533/Perusakan-Tempat-Ibadah-Haram-Hukumnya>)

Suara Merdeka, 19 Februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/19/137410/Warga-Datangi-Mapolda>)

Suara Merdeka,10 Februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/10/136648/Uluran-Tangan-yang-Menyejukkan>)

Suara Merdeka, 18 februari 2011
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/18/137304/Tiga-Kerusuhan-Tak-Saling-Terkait->

Suara Merdeka, 9 Februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/09/136543/Terpidana-Minta-Maaf->)

Suara Merdeka, 13 Februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/13/136834/24-Tersangka-Dipindah-ke-Mapolda-Jateng>)

Suara Merdeka. 14 Juni 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/06/14/149478/840-Personel-Kawal-Sidang-Sihabudin>)

Suara Merdeka, 21 Februari 2011(diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/21/137587/Adayang-Senang-kalau-Indonesia-Ribut->)

Suara Merdeka, 10 Juli 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/07/10/151997/13/Banyak-PR-untuk-Kapolda-Baru>)

Suara Merdeka, 18 Februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/18/137316/Forum-Ulama-Jenguk-Sihabudin-di-Tahanan>)

Suara Merdeka, 10 Februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/10/136590/Jaga-Kerukunan-Beragama-Saling-Asah-dan-Asuh>)

Suara Merdeka, 15 April 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/04/15/143521/Jaksa-Bantah-Rekayasa-Dakwaan>)

Suara Merdeka, 13 Mei 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/05/13/146398/Jaksa-Tak-Siap-Tuntutan-Ditunda>)

Suara Merdeka, 11 februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php/read/cetak/2011/02/11/136721/Kayuh-Sepeda-40Km-untuk-Membantu>)

Suara Merdeka, 11 Februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/11/136685/Kerusuhan-Dipengaruhi-Politik-dan-Ekonomi>)

Suara Merdeka, 12 Februari 2011(diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/12/136837/Kerusuhan-Dipicu-Pihak-Luar->)

Suara Merdeka, 14 Februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/14/136972/Kompolnas-Ada-Kesan-Pembiaran-Massa->)

Suara Merdeka, 10 Februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/10/136652/Ormas-Anarkis-Bisa-Dibubarkan>)

Suara Merdeka, 22 Juni 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/06/22/150298/Syihabudin-Tidak-Jadi-Banding>)

Suara Merdeka, 10 februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/10/136644/Tokoh-Agama-Waspadai-Serangan-Balik>)

Suara Merdeka, 9 Februari 2011 (diakses tanggal 19 Maret 2012)
(<http://www.suamerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/02/09/136543/Terpidana-Minta-Maaf->)

Internet

PERPES NO 30 TAHUN 2005 (diakses tanggal 13 Agustus 2012) dan tersedia dalam (http://www.dephut.go.id/INFORMASI/pp/PP_30_05.pdf)

LAMPIRAN



CODING SHEET

Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan Kerusuhan Temanggung di Harian Suara Merdeka

(Analisis Isi Kuantitatif Terhadap Pemberitaan Kerusuhan Temanggung di Harian Suara Merdeka pada Bulan Februari-Juli 2011)

Peneliti

Nama Surat Kabar : Harian Suara Merdeka

Judul berita :

Hari, Tanggal Terbit :

Nama Pengkoding :

• Orientasi pada Perdamaian

1. Apakah pemberitaan menggali proses terjadinya konflik?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah pemberitaan berada dalam ruang dan waktu terbuka?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah pemberitaan membuat konflik menjadi transparan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah pemberitaan memberikan kesempatan bersuara kepada semua pihak?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah ada unsur empati dalam pemberitaan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Apakah pemberitaan melihat konflik sebagai masalah?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Apakah pemberitaan melihat sisi kemanusiaan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah di dalam pemberitaan mengecam penggunaan senjata?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Apakah pemberitaan bersifat proaktif (mengindari kekerasan/perang)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
10. Apakah pemberitaan berfokus pada dampak yang tidak terlihat?
 - a. Ya
 - b. Tidak

- **Orientasi pada kebenaran**
 1. Apakah di dalam pemberitaan mengungkap kebenaran dari semua sisi?
 - a. Ya
 - b. Tidak

- **Orientasi pada masyarakat**
 1. Apakah pemberitaan berfokus pada pada penderitaan semua (terutama anak-anak dan wanita)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 2. Apakah di dalam pemberitaan menyebut semua nama pelaku kejahatan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 3. Apakah pemberitaan berfokus pada orang-orang yang membawa perdamaian dari kalangan masyarakat?
 - a. Ya
 - b. Tidak

- **Orientasi pada penyelesaian**
 1. Apakah di dalam pemberitaan konflik diselesaikan secara kreatif dan tanpa kekerasan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 2. Apakah di dalam pemberitaan menyoroti prakarsa-prakarsa perdamaian serta mencegah lebih banyak perang/kekerasan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 3. Apakah di dalam pemberitaan ada fokus pada struktur masyarakat yang damai?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 4. Apakah di dalam pemberitaan ada fokus pada budaya masyarakat damai?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 5. Apakah ada upaya resolusi dalam pemberitaan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 6. Apakah ada upaya rekonstruksi dalam pemberitaan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 7. Apakah ada upaya rekonsiliasi dalam pemberitaan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

SUARA MERDEKA

TAMBAHAN BIAYA HALAMAN KHUSUS

- Halaman 1
- Sudut kiri bawah, ukuran 2 kolom x 150 mm + 300%
- Halaman Akhir + 100%
- Posisi mengikat di halaman lain + 50%
- Halaman lain yang mengikat + 25%

KETENTUAN LAIN

- Semua pemasangan iklan dikenakan PPN 10%
- Semua pembayaran dilakukan di depan/sebelum pemuatan iklan.
- Materi iklan dalam bentuk FA atau film yang sudah siap. Materi yang belum siap dikenakan biaya produksi 2,5% dari biaya iklan, tidak termasuk ilustrasi foto.
- Deadline iklan berwarna 7 (tujuh) hari sebelum tanggal muat, iklan hitam-putih 3 (tiga) hari sebelum tanggal muat.
- Pembatalan order iklan hanya dapat diterima selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum deadline.
- Pengaduan kesalahan cetak/muat hanya dapat diterima paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemuatan.
- Tinggi iklan di atas 500 mm dihitung tinggi maksimal 540 mm.



SUARA MERDEKA

Perekat Komunitas Jawa Tengah

PT. Suara Merdeka Press
: **Harian SUARA MERDEKA**
: **001/SK/MENPEN/SIUPP/A-7/1985**
: **Advertisement & Circulation**
: **Jl. Pandanaran 30, Semarang 50241**
: **PO BOX. 1055 SMG.**
: **Phone (024) 8412600.**
: **Fax (024) 8411116, 8447858**
: **sumer_iklan@yahoo.com**
: **redaksi@suaramer.familii.com**
: **Jl. Raya Kaligawe Km 5, Semarang 50118**
: **Phone (024) 6580900**
: **Fax (024) 6580605**
: **General News Reporting**
: **Daily (7 days a week); 28 pages**
: **Indonesian**
: **H. Hetami (1950)**
: **Ir. Budi Santoso**
: **Kukrit Suryo Wicaksono, MBA**
: **Sasongko Tedjo, SE, MM**
: **Harry Atandi, SH**
: **250.000 copies**
: **Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur,**
: **Jawa Barat and Yogyakarta**

Mechanical data
: **Page Size**
: **402 X 540 mm**
: **Col. Length**
: **540 mm, 9 cols. Per page.**
: **Print method**
: **Offset.**
: **Advertisement Rates**
: **B/W**
: **Rp. 30.000,00 / mime**
: **Spot Color**
: **Rp. 35.000,00 / mime, Minimum 600 mime**
: **Full Color**
: **Rp. 40.000,00 / mime**
: **Deadline**
: **Booking Color**
: **7 days**
: **Booking B/W**
: **3 days**
: **Cancellation**
: **2 days**

SIAPA PEMBACA ?

Jenis kelamin
- Pria 53%
- Wanita 47%

Kelompok usia
- 18-19 tahun 18%
- 20-49 tahun 74%
- 50+ tahun 8%

Tingkat pendidikan
- Tidak lulus SLTA 24%
- Lulus SLTA 45%
- Sarjana 31%

Pekerjaan pembaca
- PNS 32%
- Pegawai swasta 26%
- Pengusaha & profesional 10%
- Pelajar & mahasiswa 20%
- Ibu rumah tangga 5%
- Lain-lain 7%

Kelas Sosial Ekonomi
- A 21%
- B 19%
- C 49%
- D 9%
- E 2%

DI MANA PEMBACA ?

Wilayah Semarang 89.558 eks
Wilayah Pekalongan 27.025 eks
Wilayah Pati 36.798 eks
Wilayah Banyumas 23.250 eks
Wilayah (Kedu) 26.879 eks
Wilayah Surakarta 15.500 eks
Wilayah Di Yogyakarta 13.225 eks
Wilayah DKI & Jawa Barat 9.300 eks
Wilayah Jawa Timur 3.231 eks

Berita Utama

12 Februari 2011

Kapolres dan Dandim Temanggung Dicotot

- Kapolda Banten Juga Diganti

TEMANGGUNG - Kerusuhan di Temanggung akhirnya memakan "korban" dari jajaran aparat keamanan. Kapolres Temanggung AKBP Anthony Agustinus Koylal dan Dandim 0706 Temanggung Letkol Kav Asef Ridwan dicopot, kemarin.

Pencopotan dan serah terima jabatan (sertijab) kedua perwira itu dilakukan secara mendadak. Anthony diganti oleh mantan Kapolres Rembang AKBP Kukuh Kalis, sedangkan Asef Ridwan diganti Letkol Inf Zainuddin yang sebelumnya bertugas di Kodam IV/Diponegoro. Selanjutnya Anthony ditarik ke Mapolda Jateng, sedangkan Asef Ridwan ditugaskan di Makodam Diponegoro.

Hal yang sama terjadi di Banten. Tiga perwira, yakni Kapolda Banten Brigjen Agus Kusnadi, Direktur Intel Polda Banten Kombes Adityawarman, dan Kapolres Pandeglang AKBP Alex Fauzi Rasyad juga dicopot, menyusul kasus penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah yang menewaskan tiga orang.

Pencopotan kapolres Temanggung dan perwira-perwira lainnya diduga lantaran mereka dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya. Namun Kapolda Jateng Irjen Edward Aritonang mengatakan, kapolres Temanggung berhasil menjalankan tugasnya untuk mengamankan sidang penistaan agama yang berbuntut perusakan tiga gereja dan sejumlah fasilitas umum.

"Siapa yang gagal, kita kan bekerja.

Tugas kapolres ketika itu adalah mengamankan jalannya persidangan dan perangkat persidangan, dan sudah berhasil. Kalau kemudian ada dampaknya, itu memang benar. Hal tersebut yang kita sesalkan, dan akan dievaluasi terus," jelas Edward usai memimpin serah terima jabatan yang digelar secara tertutup di Mapolres Temanggung, semalam.

Sertijab dihadiri antara lain Bupati Hasyim Afandi, Wabup Budiarto, dan Kajari Agus Budi Santoso. Kapolda menambahkan, pergantian kapolres itu dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan keamanan di Temanggung. Karena itu, pihaknya memilih kapolres baru yang paham kota tembakau itu. AKBP Kukuh Kalis adalah putra Magelang, daerah yang secara geografis dan sosiologis dekat dengan Temanggung.

"Kami punya target untuk menyelesaikan kasus kerusuhan di Temanggung dengan cepat. Karena itu perlu darah segar, kapolres baru yang lebih muda," ujar Edward.

Terkait dengan perkembangan penyelidikan, Edward mengatakan, jumlah tersangka kerusuhan dan perusakan yang semula delapan orang kini telah bertambah menjadi 14 orang. Hal itu menyusul ditetapkannya enam orang lagi sebagai tersangka pada pemeriksaan kemarin.

”Hari ini (kemarin) kami memeriksa 24 saksi, yang ditetapkan sebagai tersangka enam orang. Semuanya berasal dari Kabupaten Temanggung,” jelasnya sembari menambahkan, pihaknya masih mendalami kasus itu dan mencari otak kerusuhan. Mulai hari ini kasus itu akan ditangani penyidik Polda Jateng.

Tim pembela hukum para tersangka dan saksi yang diperiksa kemarin, Sulaiman dari LBH Wonosobo mengatakan, delapan orang yang sejak awal ditetapkan sebagai tersangka berasal dari tiga kecamatan, yakni Tretep, Parakan, dan Kedu. Adapun 24 orang yang diperiksa kemarin berasal dari Desa Sighedong, Kecamatan Tretep.

”Mereka rata-rata berumur 23-35 tahun, dan sebetulnya hanya ikut-ikutan. Ketika itu, beredar pesan pendek untuk ikut menyaksikan sidang. Kebanyakan dari mereka berpendidikan rendah dan kualitas SDM-nya memang kurang,” ungkapnya.

Sementara itu Danrem 072/Pamungkas Kolonel Kav Sumedy menampik pergantian Dandim Temanggung terkait kerusuhan beberapa hari lalu. Menurutnya, pergantian itu lazim dilakukan agar tugas TNI bisa terlaksana lebih baik.

”Biasanya orang mengait-ngaitkan jika ada situasi seperti kemarin. Tapi yang jelas, TNI AD berharap pergantian ini bisa mewujudkan situasi yang lebih baik ke depan, baik untuk satuan maupun untuk wilayah Temanggung,” katanya usai memimpin upacara sertijab di aula Kodim.

Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Temanggung menyambut gembira pergantian tersebut. Sekretaris FUIB Taufan Sugiyanto berharap pergantian itu akan menjadikan Temanggung dengan segala tipologi masyarakatnya akan menjadi lebih baik.

Perekam Video Di Jakarta, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam menyatakan Kapolda Banten Brigjen Agus Kusnadi dan sejumlah pejabat Polda Banten dicopot menyusul penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah.

”Alasan (pencopotan) di antaranya untuk kepentingan organisasi, supaya bisa berjalan sehat dan lancar,” ujarnya.

Dalam Telegram Rahasia Nomor STR/105/II/2011, tertera Kapolda Banten Brigjen Agus Kusnadi diganti oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Putut Eko Bayuseno. Putut pernah menjadi ajudan Presiden SBY. Agus akan pindah ke Mabes Polri sebagai Staf Ahli Kapolri Bagian Analisis Kebijakan Keamanan. Direktur Intel Polda Banten Kombes Adityawarman dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Gadikwa Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol). Dia diganti AKBP Sudyanto yang sebelumnya Wakil Direktur Intelkam Polda Jambi.

Adapun Kapolres Pandeglang AKBP Alex Fauzi Rasyad dimutasi menjadi Perwira Menengah (Pamen) Sops Mabes Polri. Posisinya digantikan oleh AKBP Ady Soeseno yang sebelumnya menjabat Kabag Analis Direktorat Narkoba

Polda Banten.

Di sisi lain, penyidik Bareskrim Polri tengah menganalisis video sekelompok massa yang menyerang jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2). Polisi juga meminta keterangan perekam video tersebut, seorang PNS yang juga anggota jemaat Ahmadiyah berinisial A.

Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi menyatakan, analisis terhadap video tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku penyerangan yang mengakibatkan tiga orang tewas dan enam lainnya luka-luka. Penyidik juga tengah memeriksa lima tersangka, yaitu HE, YA, UJ, HM, dan KMH serta sejumlah saksi.

Pihaknya masih menyelidiki aksesoris yang digunakan para penyerang, yakni pita biru dan hijau yang dipakai para penyerang. Menurut Ito, pita tersebut mempunyai makna. Namun dia tidak menjelaskannya lebih lanjut. "Nanti setelah pemeriksaan selesai akan terungkap makna pita tersebut," ujarnya, kemarin.

Tentang perekam video berinisial A, Ito mengatakan, identitas lelaki itu dirahasiakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga A batal muncul ke publik untuk menceritakan kronologi kejadian kepada wartawan di Bareskrim Polri.

"Saya sarankan lebih baik tidak usah (memberi keterangan ke wartawan), karena dari pertimbangan intelijen akan berbahaya buat dia (A) kalau ada pihak yang tidak senang," tambah Ito.

Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Josep Adi Prasetyo mengatakan, pihaknya mendapat informasi tentang bahaya yang mengancam A dari Komjen Ito Sumardi. Dia mengatakan, karena ada ancaman tersebut, atas saran dari kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) maka A batal muncul ke publik untuk memberikan keterangan kepada wartawan. "Sekarang dia (A) di bawah perlindungan LPSK," ujarnya di Bareskrim saat mendampingi pemeriksaan A oleh penyidik Polri.

Lebih lanjut Josep mengatakan, saat merekam kejadian tersebut A mengaku dalam keadaan ketakutan dan gemeteran, meski video yang dihasilkan terlihat stabil dan tidak ada efek gemeteran tangan si pemegang kamera. "Dia menggunakan top holder," jelasnya.

Menurut dia, gambar video tersebut berkualitas baik karena A berpengalaman menggunakan kamera. A juga mempunyai usaha video shooting. Saat kejadian, dia tidak diganggu oleh penyerang karena mengaku berprofesi wartawan.

Menyangkut dugaan kelalaian oleh aparat Polda Banten dan Polres Pandeglang, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar menyatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan. Namun dia tidak menyebutkan identitas polisi yang diperiksa tersebut.

"Kami tengah melakukan pemeriksaan internal," ujarnya.

Punya Hak Hidup Sekitar 130 kiai dan ulama dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Madura meminta pemerintah bersikap tegas menyangkut keberadaan dan ajaran Ahmadiyah di Indonesia. Para ulama itu mengingatkan pemerintah agar berani membubarkan Ahmadiyah.

Hal itu merupakan salah satu rekomendasi forum atau halaqah ulama se-Jawa dan Madura yang digelar Majelis Silaturrohim Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MSP3I) di Pondok Pesantren Sidogiri, Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jatim, Jumat (11/2). Menurut para ulama, pembubaran itu perlu dilakukan untuk menghindari kemungkinan bentrokan antaranggota masyarakat dan menjaga stabilitas nasional.

Di Surabaya, 34 petinggi parpol di Jatim menyatakan menolak segala macam bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama dan penistaan agama. Maklumat anti kekerasan itu dibacakan di depan Gubernur Jatim Soekarwo, saat acara silaturahmi pimpinan parpol di kantor DPW PKB Jatim.

Hadir pada acara itu antara lain Ketua Partai Golkar Jatim Martono, Ketua DPW PKS Jatim Hammy W, Ketua DPD PDIP Jatim Sirmadji, Ketua DPW PKB Jatim Imam Nahrawi, Ketua DPW PBB Jatim Sudarno Hadi, dan Ketua DPD Gerindra Jatim Suprayitno.

Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri, Tanribali Lamo mengatakan, pembubaran Ahmadiyah di Indonesia belum tentu dapat menyelesaikan persoalan kekerasan yang terjadi terhadap jemaat Ahmadiyah.

Persoalan yang membuat relasi buruk antara pengikut Ahmadiyah dan umat Islam Indonesia pada umumnya adalah ajarannya yang mengakui adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. "Jadi, dibubarkan secara organisasi belum tentu langsung bisa menyelesaikan masalahnya. Apakah bisa, ajaran berhenti setelah organisasinya bubar," katanya di Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, di sisi lain pengikut Ahmadiyah adalah warga negara yang memiliki hak untuk hidup dan mendapat perlindungan. "Jadi, ini persoalan pelik. Walaupun bisa, kita tidak bisa asal membekukan dan membubarkannya," ujarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kemendagri sedang membahasnya bersama Kementerian Agama untuk mencari jalan keluar terbaik. (H24,dit,K24, F4,G14-25,59)

Berita Utama

09 Februari 2011

Lima Tersangka Ditahan

Temanggung Mulai Tenang

- Banser Akan Jaga Gereja

TEMANGGUNG- Suasana Kota Temanggung semalam kembali tenang setelah dilanda kerusuhan siang hari sebelumnya. Dalam kerusuhan yang dipicu vonis terhadap terdakwa kasus penistaan agama itu, tiga gereja, sejumlah fasilitas umum, dan kantor polisi dirusak massa. Polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun 9 orang terluka dan dirawat di RSUD Temanggung.

SM/Juli Nugroho Berdasarkan pantauan, semalam, sejumlah pertokoan di jantung kota, yakni di Jalan Sudirman dan Jl S Parman, yang ditutup saat terjadi kerusuhan, kembali dibuka dan melayani pembeli. Di samping itu, warung-warung tenda di beberapa jalan protokol dan di seputar alun-alun yang menjajakan makanan juga buka seperti biasanya.

Jalur lalu lintas dari arah Magelang, atau tepatnya setelah Terminal Madureso, yang ditutup saat pecah aksi massa pecah, sudah dibuka lagi dan berfungsi seperti biasa. Bus-bus umum dan angkudes serta kendaraan pribadi melintas dengan lancar. Kendari demikian, ratusan aparat kepolisian dan TNI dan TNI masih bersiaga di sejumlah lokasi untuk mengamankan situasi.

Kerusuhan di kota yang selama terkenal adem ayem itu bermula dari sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan (50). Majelis hakim PN Temanggung yang diketuai Dwi Dayanto menjatuhkan hukuman maksimal 5 tahun penjara sesuai dengan tuntutan jaksa. Namun, massa merasa tidak puas dan menginginkan terdakwa dihukum mati. Sidang belum ditutup, tanpa dikomando pengunjung sidang merangsek ke depan dan berusaha menangkap Antonius. Puluhan personel kepolisian yang sudah bersiaga segera memasukkan terpidana ke mobil Brimob yang disiapkan di samping barat ruang sidang.

Meski terpidana berhasil diselamatkan, mobil tidak bisa langsung bergerak karena diadang massa. Mereka berteriak menuntut agar Antonius diturunkan dari mobil dan melempari kendaraan baja tersebut dengan berbagai benda keras. Konsentrasi massa baru terpecah setelah polisi berulang kali mengeluarkan tembakan gas air mata. Terpidana kemudian dibawa keluar dari gedung pengadilan menuju rumah tahanan.

Massa yang tak terkendali melempari gedung PN dengan batu, lalu merusak dan membakar mobil perintis Polres di depan kantor pengadilan. Ribuan orang kemudian bergerak menuju Gereja Katolik Santo Petrus-Paulus. Dengan leluasa mereka menghancurkan sejumlah fasilitas peribadatan yang tidak nampak dijaga aparat kepolisian tersebut.

Massa juga merusak Gereja Bethel dan Sekolah Kristen Sekinah di Jl Sutoyo. Hampir separo bangunan gereja itu rusak terbakar. Gereja Pantekosta di

Indonesia (GPDI) Jl S Parman tak luput dari amukan massa. Beberapa mobil dan motor dibakar.

Massa juga merusak kantor Mapolres Temanggung, dua pos polisi, dan sejumlah rambu lalu lintas. Selama aksi, mereka terus berteriak mengingatkan warga yang menyaksikan dari pinggir jalan agar tidak mengambil gambar, baik dengan kamera maupun ponsel. Namun ada beberapa warga yang nekat memotret sehingga nyaris menjadi korban amukan massa.

Sedikitnya tiga perusuh luka tembak dan dua lainnya luka terkena pecahan kaca serta lemparan batu. Mereka langsung dilarikan ke RSUD Temanggung. Kerusakan itu melumpuhkan aktivitas warga. Sejumlah kantor bank dan toko, termasuk yang berada di kawasan Pasar Kliwon, langsung ditutup begitu gelombang massa berjalan menuju pusat kota. Kerusakan baru bisa diredam setelah sejumlah tokoh agama turun dan menenangkan massa. Usai bernegosiasi dengan polisi yang berjaga di sekitar gedung PN, sekitar pukul 12.30 massa membubarkan diri.

Usai kericuhan, suasana masih terlihat mencekam. Kendaraan polisi nampak berlalu lalang memantau situasi.

Seorang jemaat mengatakan, saat massa datang guru-guru Sekolah Kristen Sekinah sedang rapat. Tiba-tiba saja, dari arah luar sekolah dihujani batu. Massa masuk melompat pintu gerbang sekolah yang dikunci.

Satpam tak mampu berbuat apa-apa ketika lobi dan satu ruang kelas dibakar. Selain menghujani batu dan merusak dengan senjata, diperkirakan mereka melemparkan bom molotov. Namun demikian tidak ada yang terluka dalam insiden itu.

”Kami tidak mengira kalau akan terjadi seperti ini. Tadi di sini kira-kira ada sekitar 30-an guru dan karyawan. Setelah mendengar ada ribut-ribut, mereka lari menyelamatkan diri ke belakang. Beruntung anak-anak hari ini diliburkan,” ujar seorang satpam Sekolah Kristen Shekinah.

Sementara itu, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Tegowanuh, di Kecamatan Kaloran, yang berada di luar kota juga dirusak massa yang datang mengendarai mobil pikap dan sepeda motor.

”Kira-kira mereka berjumlah lima belas orang, langsung merusak pintu gerbang dan masuk gereja lewat pintu yang kebetulan tidak dikunci. Saya langsung lari menyelamatkan diri dalam kamar,” kata seorang saksi.

Pendeta Simon Sudi (48) menjelaskan, peristiwa itu terjadi tidak berlangsung lama, hanya sekitar lima menit. Selain kaca, beberapa peralatan ibadah dan alat musik seperti keyboard dan drum rusak. Mobil pribadi milik Simon mengalami kerusakan, kaca bagian belakang pecah. Selain itu satu sepeda motor rusak.

Kerusuhan itu mengakibatkan sembilan orang luka-luka sehingga harus dilarikan ke RSUD Temanggung.

Mereka adalah Madiyo, Iwan, Sukarman, Solahudin, Raihanif, Supangat, Jirene, Cecep, dan Sriyati.

Namun belum jelas apakah mereka berasal dari massa yang anarkis atau warga sekitar.

Dikirim SMS

Lima orang untuk sementara ditetapkan menjadi tersangka kerusuhan. Jumlah tersebut masih bisa bertambah. Hal itu diungkapkan Kapolda Irjen Edward Aritonang dalam jumpa pers di Polres Temanggung, kemarin.

Kapolda belum bisa menyebutkan identitas kelima tersangka itu. Menurutnya, para pelaku bukan warga Temanggung. Dia juga mengatakan, di antara massa yang datang menyaksikan persidangan dan selanjutnya melakukan perusakan itu, semula tidak berkeinginan berbuat seperti itu.

”Di antaranya, ada yang datang karena dikirim SMS atau pesan singkat dari saudaranya untuk mengikuti kegiatan dakwah, namun setelah berkumpul ternyata untuk menyaksikan persidangan dan melakukan perusakan,” ujarnya. Dia mengatakan pula, pihaknya akan mendalami, apakah kerusuhan dan perusakan tersebut dilakukan para pelakunya secara spontan atau karena ada yang menghasut. Sebab, sejak awal, sebenarnya perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Temanggung itu bukanlah kasus pertentangan agama, melainkan penodaan agama.

”Dan yang merasa dinodai bukan hanya pemeluk agama Islam, tetapi penganut agama Kristen juga merasakannya,” tutur dia.

Ketua PN Temanggung, Dwi Dayanto mengatakan, vonis kepada tersangka dipercepat, selain karena perkaranya sebetulnya ringan namun sensitif, juga melihat kondisi sosiologis massa setiap persidangan. Dirinya juga telah berupaya memutuskan dengan adil sesuai dengan koridor hukum.

”Undang-undang yang berlaku memang menentukan sanksi seberat-beratnya lima tahun. Jika masyarakat menghendaki lebih dari itu, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan yang ada,” ujarnya.

Di Jakarta, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor Nusron Wahid memerintahkan ormas kepemudaan Nahdlatul Ulama itu dan Barisan Serbaguna (Banser) di Temanggung dan Kedu bekerja sama dengan aparat keamanan dan elemen masyarakat lainnya memberikan perlindungan terhadap warga dan ikut menjaga fasilitas publik serta tempat agama, termasuk gereja yang menjadi sasaran amuk massa.

Selain itu, menurut Nusron, Ansor akan mengerahkan anggota Banser untuk melakukan bakti sosial dalam bentuk membantu renovasi gereja, tempat ibadah, dan fasilitas umum yang rusak akibat amuk massa.

Menurutnya, perusakan itu tidak dapat ditoleransi secara hukum dan moral.

“Tidak ada ajaran agama apa pun yang memperbolehkan melakukan tindakan anarki, kendati dengan dalih menjalankan perintah agama,” kata Nusron.

(H24,J1,dit,di-59)

Berita Utama

11 Februari 2011

Temanggung setelah Rusuh

Kayuh Sepeda 40 Km untuk Membantu

KAMIS (10/2) pagi, suasana Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Jalan S Parman Temanggung, gaduh oleh suara orang-orang, baik lelaki maupun perempuan.

Sebagian dari mereka menghancurkan eternit. Para perempuan riuh di belakang gereja. Bunyi berderit acapkali terdengar saat meja kursi diangkat. Debu beterbangan ketika eternit bekas dilemparkan ke dalam bak truk. Rusuh lagi?

Bukan. Meski riuh, suasana kali ini sangat berbeda dengan hari sebelumnya saat massa yang anarkis memecah kaca-kaca, membakar sepeda motor dan mobil, di area gereja tersebut.

Kemarin kondisinya berbalik seratus delapan puluh derajat. Tak ada sedikit pun suasana mencekam. Yang ada hanya senyum ramah dan tawa canda.

Orang-orang yang riuh itu bukan sedang membuat onar. Sebaliknya, mereka tengah bekerja bakti memperbaiki GPdI yang rusak. Jemaat, warga, dan anggota TNI bahu-membahu.

Mereka membersihkan puing-puing bagian bangunan yang rusak. Prpto Diharjo (80) misalnya, tampak begitu bersemangat memunguti pecahan-pecahan eternit dan kayu-kayu kecil yang berserakan.

Meski sudah sepuh, lelaki ini seolah tak kehabisan energi untuk ikut membantu membersihkan gereja. Prpto adalah warga Kelurahan Butuh, Kecamatan Jetis, yang rumahnya berada tepat di belakang gereja.

Selain Prpto, ada juga Umar (59). Pria yang rambutnya sudah memutih ini tak kalah gesit. Dengan cekatan dia mengangkat material bekas bangunan, yang sebagian berwarna hitam bekas terbakar, untuk dimasukkan ke dalam karung kecil.

Dalam kerja bakti ini seolah tak ada perbedaan di antara mereka, terutama soal agama. Semua seperti saudara.

Tak hanya masyarakat Temanggung yang ikut membantu. Seorang warga asal Dusun Karanglo, Bandungan, Kabupaten Semarang, juga tergerak hatinya untuk membantu sesama.

Dia adalah Absari. Pria berumur 43 tahun ini sengaja datang untuk membantu membersihkan gereja. Meski seorang muslim, Absari tanpa ragu ikut ambil bagian. Baginya, membantu sesama adalah sebuah kewajiban. Absari bahkan rela mengayuh sepeda onthel-nya sejauh 40 km dari rumahnya hingga kota Temanggung.

“Saya sengaja datang ke sini untuk membantu membersihkan gereja yang rusak akibat kerusuhan kemarin. Menurut saya, tolong menolong dalam kebaikan tidak perlu melihat perbedaan. Kalau kita hidup rukun, kita juga yang akan merasakan enaknya,” ujar pria yang sehari-hari bekerja serabutan ini.

Konsumsi

Ketika anggota TNI, jemaat, serta masyarakat melakukan bersih-bersih, para wanita di rumah bagian belakang sibuk mempersiapkan makanan dan minuman. Saat istirahat, beberapa di antaranya dengan ramah mempersilakan siapa pun untuk menyantap hidangan yang sudah tersaji.

Andrew Assa (41), putra pendeta Franz Assa, menyambut gembira kedatangan semua pihak yang membantu pembenahan gereja.

Menurut rencana, perbaikan akan meliputi penggantian plafon, eternit, serta pengecatan beberapa dinding.

”Kami akan mengganti eternit dan mengecat dinding. Ruang utama tidak apa-apa, hanya terkena dampak dari api dan asap. Contohnya kursi ini, sekilas tidak apa-apa, tetapi kalau diduduki berjelaga,” ujarnya.

Assa juga mengatakan, ada bantuan berupa eternit dalam jumlah lumayan banyak, namun sampai sekarang belum diketahui siapa pemberi bantuan itu.

Gereja Pantekosta mengalami kerusakan di beberapa bagian. Di tempat itu, tiga mobil dan beberapa sepeda motor hangus dibakar. Kerugian ditaksir mencapai Rp 500 juta.

Meski begitu, para jemaat tidak patah semangat. Menurut Assa, mereka akan kembali melakukan peribadatan hari Minggu mendatang.

Dia berharap keadaan cepat pulih seperti sediakala, menjadi Temanggung yang selalu bersenyum sesuai karakter masyarakatnya yang tenang dan ramah.

Tak hanya di GPdI. Kerja bakti serupa juga dilakukan di Gereja Katolik Santo Petrus Paulus, Jalan Jenderal Sudirman. Di tempat ini, puluhan personel TNI dari Kodim 0706 Temanggung, Armed 11, dan Armed 3 Magelang membersihkan kompleks gereja.

”Kami ikut membantu membersihkan gereja dan sekolah yang terkena dampak kejadian tanggal 8 kemarin. Ini adalah semangat kebersamaan,” kata Danramil Jumo, Kapten Infanteri Subakir.

Gereja Katolik Santo Petrus sampai kini masih dijaga oleh TNI-Polri.

Peribadatan sudah dimulai pada pagi harinya. Mulai minggu lusa, semua kegiatan keagamaan akan dilaksanakan seperti sediakala. (Raditia Yoni Ariya-43)

Berita Utama

16 Februari 2011

Dalang Rusuh Belum Tersentuh

- Ada Keganjilan dalam Kasus Temanggung

SEMARANG- Penyidikan terhadap 25 tersangka kasus perusuhan di Temanggung terus dilakukan. Namun, dalang kasus kekerasan itu belum tersentuh.

Dari hasil penyidikan sementara, polisi menengarai Sihabuddin merupakan penggerak massa. Peran pemimpin Pondok Al-Hadist, Desa Kebundari, Kecamatan Wonoboyo, Temanggung itu terus diselidiki.

Namun, diduga ada aktor intelektual yang belum terungkap. Karena itu, untuk menuntaskan kasus tersebut polisi didesak mengungkap jati diri terpidana kasus penistaan agama, Antonius Richmond Bawengan, dan apa motifnya berada di Temanggung. Melihat beberapa fakta di lapangan, Antonius diyakini tidak melakukan tindakan itu secara individu.

Desakan itu dilontarkan Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua DPD La Ode Ida, dan Ketua Komite III DPD RI Isti Syahroh saat berkunjung ke Temanggung, Senin (14/2).

"Kehadiran Antonius di Temanggung harus diteliti dan diungkap secara jujur. Apa motifnya dan siapa yang berada di belakangnya. Saya juga mendengar, ada orang luar yang datang ke sini (Temanggung) untuk ikut dalam kerusuhan. Kepolisian harus mengungkap secara tuntas. Saya berharap, tidak hanya orang Temanggung yang ditangkap, karena ada dugaan pelaku lain dari Solo dan Pekalongan. Ini harus diungkap secara detail," kata Abdul Kadir Karding.

Isti Syahroh menyoroti beberapa keganjilan dalam kerusuhan itu. Ia mempertanyakan, kenapa pada tanggal 8 Februari Sekolah Kristen Shekinah dan Kanisius diliburkan. Menurutnya, dengan demikian semestinya sudah tercium gelagat akan terjadi peristiwa itu. Ia menekankan agar segera dicari akar permasalahan hingga langkah antisipasi selanjutnya.

"Perlu diusut, siapa pembuat buku (penistaan agama) itu sesungguhnya, dan siapa jati diri Antonius Richmond Bawengan. Saya menganalisis, kemungkinan Antonius hanya peluru. Yang menjadi pertanyaan, siapa pelontar peluru tersebut. Kerusuhan itu terlihat seperti by design (didesain-Red). Sebab, jika ada massa dari luar kota Temanggung, pasti ada yang memberi ongkos, tidak mungkin mereka datang secara cuma-cuma," tegasnya.

Hal senada dikatakan La Ode Ida. Ia menambahkan, sejatinya NKRI berdiri di atas keberagaman, sehingga kalau ada satu golongan yang mengganggu ketenteraman hidup pihak lain, maka spontan akan muncul reaksi luas. Menyikapi hal itu, Kapolres Temanggung AKBP Kukuh Kalis mengatakan pihaknya sudah melakukan pendalaman terhadap sosok Antonius. Namun kapolres enggan menjelaskannya lebih lanjut.

"Itu sifatnya silent operation," ujarnya singkat.

Dalam kunjungan itu, anggota DPR dan DPD mencari informasi dan bukti sebagai bahan otentik. Mereka berdialog dengan Muspida dan para tokoh masyarakat, serta melihat kondisi gereja dan sekolah yang dirusak massa. Dialog berlangsung di ruang Loka Bhaktipraja kompleks Setda Temanggung, dihadiri Bupati Hasyim Affandi, Kapolres AKBP Kukuh Kalis, Dandim 0706 Letkol Inf Zainuddin, Kajari Agus Budi Santoso, perwakilan Forum Kerukunan Antarumat Beragama (FKAUB), dan lain-lain.

Menurut Karding, hasil dialog akan digunakan untuk mencari solusi terbaik agar peristiwa serupa tidak terulang.

Wakil Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKBUB) Temanggung HM Faizun mengatakan, peristiwa Temanggung bukan konflik antarumat beragama, melainkan ajang adu domba. Pasalnya, selama ini kerukunan antarumat bergama di kota tembakau itu terjalin baik, bahkan sangat harmonis.

Tidak Disamaratakan

Kapolda Jateng Irjen Edward Aritonang mengatakan, peran tersangka Sihabuddin antara lain mengoordinasi dan menyediakan makanan untuk ratusan orang yang hadir dalam sidang penistaan agama.

”Saya telah memerintahkan penyidik supaya para tersangka diperiksa sesuai peran mereka masing-masing, jangan disamaratakan,” kata kapolda dalam diskusi Polda Jateng dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Mapolda, Senin (14/2).

Hadir dalam diskusi tersebut di antaranya Ketua MUI Jateng Ahmad Daroji, mantan Gubernur Jateng Ali Mufiz, perwakilan PWNU, tokoh-tokoh agama, serta perwakilan Kemenag Jateng. Menurut kapolda, setelah dilakukan penyelidikan secara intensif, peristiwa di Temanggung bukan merupakan kerusuhan antaragama. Kejadian itu murni karena kekecewaan massa terhadap putusan sidang yang vonis lima tahun penjara terhadap terdakwa Antonius Richmond Bawengan.

Ia mengungkapkan, Polda akan berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk mencari tahu jati diri Antonius.

”La wong baru dua hari di Temanggung sudah menggemparkan, bagaimana jika dua bulan,” ujar kapolda disambut tawa hadirin.

Ia menyampaikan, jumlah tersangka bertambah satu orang. Dia bernama Muslih (23) yang memiliki dua alamat tempat tinggal, yakni di Dusun Sigendong, Tretep, Temanggung dan Dusun Banon, Desa Purworejo, Kendal.

”Muslih pada Minggu (13/2) malam menyerahkan diri ke Mapolsek Sukorejo, Kendal. Dia mengaku terlibat dalam kerusuhan di Temanggung,” kata Edward.

Para tersangka dijerat Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Ketua MUI Jateng Ahmad Daroji menyatakan setuju dengan kesimpulan Polda Jateng bahwa meletusnya kerusuhan Temanggung karena ketidakpuasan massa terhadap vonis terdakwa penistaan agama. Dia berharap Pasal 156 A KUHP tentang penistaan agama yang memberikan hukuman maksimal lima tahun penjara ditinjau ulang.

”Lima tahun jelas sangat kurang, karena dampaknya mengakibatkan ancaman di tengah masyarakat,” kata Ahmad Daroji.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Novel Ali menyatakan, meletusnya kerusuhan di Temanggung menunjukkan fungsi intelijen Polri sangat lemah.

”Sebab, eskalasinya sudah kelihatan sejak sidang pertama kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Temanggung beberapa waktu lalu,” ujar Novel. (J1,dit,H36,H21,K24-59)



Berita Utama

11 Februari 2011

Rusuh Temanggung Bukan Konflik Agama

- Tersangka Mengaku Spontan

SEMARANG- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng menyatakan, kerusuhan di Temanggung bukan konflik antaragama dan bukan antarumat beragama. "Itu ulah oknum yang tidak menghormati keyakinan agama lain," tegas Ketua MUI Jateng Drs KH Ahmad Darodji MSi, kemarin.

MUI Jateng mengambil kesimpulan tersebut setelah mendengarkan keterangan dari MUI Temanggung yang secara khusus diundang ke Semarang, Kamis (10/2).

Dalam pertemuan di Kantor MUI Jateng, Kompleks Masjid Raya Baiturrahman Jl Pandanaran 126 Semarang, MUI Temanggung diwakili HM Faizun BA (sekretaris) dan Muchsin (wakil sekretaris). Hadir juga Kepala Kesbanglinmas Jateng Agus Tusono, Kabintaldam IV/Diponegoro Haris Sufi Anwari SH, Bimas Polda Jateng Syarifudin Zuhri, dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jateng Dr H Abu Hapsin.

Menurut Darodji, MUI sangat prihatin dan mengutuk pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan tindak anarkis dengan merusak fasilitas publik dan rumah-rumah ibadah di Temanggung.

Bantu Polisi

Di Temanggung, Kapolda Jateng Irlen Edward Aritonang meminta masyarakat ikut membantu penyidik kepolisian mengungkap para pelaku kerusuhan dan perusakan gereja serta kantor pemerintah di kota tersebut.

Kerusuhan meledak di Temanggung pasca-vonis lima tahun penjara terhadap terdakwa kasus penistaan agama Antonius Richmord Bawengan, Selasa (8/2) lalu. Hingga kemarin polisi sudah menetapkan delapan tersangka dalam kasus itu.

"Kami belum dapat mengidentifikasi pelaku kerusuhan tersebut dari kelompok mana. Kami masih bekerja keras untuk mengungkap kasus ini," ujar Kapolda di Polres Temanggung, kemarin.

Dia mengatakan, jika masyarakat memiliki informasi atau fakta apa pun terkait peristiwa tersebut, agar bersedia bekerjasama dengan penyidik polisi. Tujuannya agar kasus ini bisa terang, tidak ada yang disembunyikan, pihak yang dipojokkan dan dirugikan.

Polisi masih memeriksa delapan tersangka di tempat yang dirahasiakan. Sebelumnya beredar informasi kalau delapan tersangka kerusuhan Temanggung dipindah ke Mapolda Jateng. Alasannya demi keamanan selama proses penyidikan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Djihartono mengatakan, ke-8 tersangka

diperiksa intensif untuk pengembangan kasus. Dari situ akan diketahui apakah kerusuhan dilakukan spontan atau terencana, individual atau terorganisir. Untuk sementara, dari hasil pemeriksaan, pelaku menyatakan kejadian itu dilakukan secara individual dan spontanitas. "Tapi kami masih dalam ini, kami masih kembangkan," katanya.

Ke-8 tersangka kerusuhan adalah MHY, SJ, AS, NY, SF, AK, AZ, dan SM.

Tolak Pembubaran

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membubarkan ormas yang kerap melakukan tindak kekerasan.

"Pembubaran ormas bukan solusi," kata Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh di Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, pembubaran ormas justru akan menimbulkan masalah baru. Solusi yang lebih tepat adalah melihat akar permasalahan kenapa ormas itu kerap melakukan aksi anarkis.

"Ini perlu dibongkar karena dalam beberapa kejadian tidak pernah diselesaikan," tegas Ridha.

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menilai, beberapa kasus kekerasan tidak terselesaikan dikarenakan tersandera oleh politik. (B13,H24,J1,D3,K24-43

Berita Utama

14 Februari 2011

Kompolnas: Ada Kesan Pembiaran Massa

TEMANGGUNG - Bila menilik kronologi kejadiannya, ada kesan umum bahwa aparat polisi melakukan pembiaran pada saat massa mulai berbuat onar dalam sidang kasus dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri (PN) Temanggung.

Akibatnya keonaran membesar menjadi kerusuhan, bahkan menyebar ke kawasan kota. Demikian pernyataan anggota Kompolnas, Novel Ali, usai melakukan pertemuan dengan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), Temanggung. Acara berlangsung di Gedung Pertemuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jl. Dr Sutomo, Temanggung, Minggu kemarin.

"Kesan pertama yang saya dapat, Polri melakukan pembiaran, tetapi ini penilaian subyektif. Kalau pembiaran itu benar, berarti Polri bunuh diri. Hal ini satu uji coba untuk yang sangat luar biasa," kata Novel Ali.

Dikatakan, kasus di Temanggung menjadi perhatian Kompolnas yang bertugas memastikan bahwa Polri bertindak profesional sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Khusus untuk Kapolri, Kapolda Jateng dan Kapolres Temanggung, menjadi kewajiban ketiganya membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka tidak melakukan pembiaran.

"Contohnya saja, tadi saya terima informasi dari teman-teman bahwa Mapolres dijaga ketat. Sementara masyarakat yang bergerak dari ruang pengadilan ke kota harus melewati dahulu Mapolres dengan jarak dua kilo. Lalu mengapa tidak diblokade atau dicegat? Jadi ada kesan bahwa Polri lebih melindungi kepentingan ini ketimbang kepentingan masyarakat," urai Novel. Dilematis Tetapi dia merasa ragu bila polisi melakukan pembiaran, sebab itu berarti polisi melakukan 'bunuh diri'. Maka kemungkinan personel di lapangan berada dalam situasi dilematis ketika berhadapan dengan massa sehingga tidak mengambil tindakan tegas dan tuntas.

"Kalau menurut logika umum saja pembiaran itu bunuh diri, jadi pasti tidak dilakukan. Polisi setengah-setengah mengambil tindakan karena jumlah massa lebih banyak. Pada titik di gereja dan sekolah Sekhinah itu polisi kok tidak berani bertindak, menurut saya polisi dilematis. Menurut saya karena yang dihadapi kelompok mayoritas muslim. Polisi memang dilematis keras menegakkan hukum tapi dampaknya konflik yang lebih tajam pada kelompok mayoritas," papar Novel panjang lebar.

Sementara terkait pencopotan Kapolres Temanggung, lanjut Novel, bukanlah jawaban. Yang terpenting saat ini adalah menangkap pelaku dan menemukan inti masalah bagaimana kerusuhan bisa terjadi.

"Preventif tetap yang paling utama dalam hal kerusuhan. Karenanya semua harus jadi pembelajaran. Pencopotan bukan hukuman tapi pelajaran saja," jelasnya.(dte-80)

Berita Utama

13 Februari 2011

Kerusuhan di Temanggung

24 Tersangka Dipindah ke Mapolda Jateng

SEMARANG - Sebanyak 24 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerusuhan dan pengrusakan di Temanggung, Sabtu (12/2), dipindahkan ke Mapolda Jateng. Para tersangka diangkut menggunakan dua bus milik Polda dan mobil lain dengan pengawalan ketat pasukan Brimob bersenjata lengkap.

Bus yang berisi 22 tersangka tiba di Mapolda Jateng sekitar pukul 14.45. Para tersangka yang masing-masing masih berumur relatif muda tersebut langsung dibawa masuk ke ruang rapat Ditreskrim Polda Jateng.

Dua tersangka lainnya, yakni Kiai Sihabuddin (46), warga Dusun Warurejo, Kebonsari, Temanggung, yang diduga sebagai otak kerusuhan sekaligus pengerak massa, dan Lutfi Hakim Aziz (33), warga Desa Mandisari RT 2 RW 6 Parakan, Temanggung, yang ditengarai sebagai provokator dibawa menggunakan mobil lain. Mereka tidak diturunkan di Polda, tetapi langsung di bawa ke Mapolrestabes Semarang.

Dipisahkannya dua orang itu untuk menghindari terjadinya konsolidasi dengan 22 tersangka lainnya. Kiai Sihabuddin yang menggunakan sorban dan kopiah putih berada di tahanan sel nomor 1, sedang Lutfi yang memakai baju biru dan peci hitam berada di sel nomor 6. Kedatangan dua orang tersebut, menarik perhatian sejumlah tahanan lain di Polrestabes Semarang.

Untuk Penyidikan

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Djihartono mengatakan, pemindahan tersangka dari Temanggung ke Mapolda Jateng bertujuan untuk memudahkan penyidikan. "Para tersangka dipindah ke Polda, hanya untuk memudahkan pemeriksaan," kata dia.

Disinggung mengenai penangkapan Kiai Sihabuddin, Djihartono menyatakan, tersangka diamankan karena dia terkait aksi kerusuhan dan perusakan di Temanggung. "Kami mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat," tegas Kabid Humas.

Para tersangka diamankan sejak meletusnya kerusuhan di Temanggung. Pada awalnya, polisi mengamankan satu orang. Dari hasil penyidikan, polisi kembali mengamankan tujuh orang tersangka. Pada Kamis dan Jumat, polisi kembali mengamankan 24 orang yang diduga terlibat. Dari 24 orang yang diperiksa, polisi menetapkan 16 tersangka baru.

Dengan demikian, hingga kemarin polisi telah menetapkan 24 tersangka, termasuk Kiai Sihabuddin dan Lutfi. Mereka ditangkap petugas gabungan yang terdiri atas Densus 88 Antiteror Mabes Polri, Resmob Polda Jateng, dan Polres Temanggung.

Polda Jateng juga mengamankan mobil L300 bernopol AD-1759-AK yang disita dari tersangka Nasrum (38), warga Dusun Kenjuran RT 13 RW 4, Purwosari, Sukorejo, Kendal. Selain itu, petugas juga mengamankan sebuah jerigen yang diduga berisi bensin, sebuah toa kecil, dan tiga senjata tajam jenis parang dan celurit, serta papan kayu. Barang-barang tersebut diamankan dari lokasi kerusuhan.

Para tersangka dan saksi, kecuali Sihabudin, didampingi tim penasehat hukum yang ditunjuk polisi. Salah satu anggota tim, Sulaiman dari LBH Wonosobo, mengatakan pihaknya tidak berkeberatan pemeriksaan tersangka dan saksi dipindah ke Polda Jateng.

Sementara itu, Sekretaris Ormas Rabithatul Ulama Indonesia, Aris Kurniawan, ketika berkunjung di Temanggung kemarin mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan penasihat hukum untuk Sihabudin dari tim pembela muslim (TPM) Solo."

Sihabudin dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Hadis, Wonoboyo. Dia juga pengurus majelis pertimbangan partai (MPP) DPC PPP Temanggung.

Sementara itu, Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Temanggung, juga mempersiapkan tim advokasi bagi para saksi dan tersangka di luar Sihabudin. Tim beranggotakan sembilan pengacara dari Semarang dan Temanggung. Yakni, Dani Sriyanto, Bambang Joyo, Taufik Nugroho, Heri Kusworo, Kalono, Mustaan, Didik Setyohadi, Kholik Saifullah dan Wasit Wibowo.

"Kami akan mendampingi para tersangka dan saksi, dan sifatnya sukarela atau tanpa mendapatkan imbalan," kata Wasit, salah satu anggota tim advokasi.

Dia mengatakan, melihat latar belakangnya, kebanyakan tersangka dan saksi adalah keluarga kurang mampu, berpendidikan rendah, dan sama sekali buta terhadap aturan hukum. Karena itu, mereka sangat perlu untuk didampingi, terutama agar hak-hak mereka dalam hukum tetap terjamin.

"Mereka adalah orang desa, yang ketika itu bersama-sama ikut-ikutan berangkat ke Temanggung untuk tujuan menyaksikan jalannya sidang, dan bukan berbuat kerusuhan," tegasnya. (H36,H55, H21,H24-35)

Berita Utama
09 Februari 2011

Terpidana Minta Maaf

SEJAK kali pertama digelar pada 13 Januari 2011, sidang kasus penistaan agama yang mendudukkan Antonius Richmond Bawengan (58) di kursi pesakitan selalu menyedot perhatian khalayak.

Ratusan orang mengikuti jalannya persidangan yang digelar rutin seminggu sekali.

Tuntutan massa agar terdakwa dihukum mati acap menimbulkan gesekan dengan aparat penegak hukum, karena dalam KUHP jelas disebutkan bahwa ancaman hukuman Pasal 156a yang dijatuhkan kepada terdakwa maksimal adalah 5 tahun penjara. Puncak ketegangan terjadi kemarin saat majelis hakim yang diketuai Dwi Dayanto menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Antonius.

”Majelis tidak menemukan hal yang meringankan terdakwa. Sedangkan hal yang memberatkan karena terdakwa memberi keterangan berbelit dan perbuatannya meresahkan warga,” tandas Dwi.

Sebelumnya, jaksa Yulianta juga menuntut hukuman 5 tahun penjara.

Menanggapi tuntutan itu, terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum menyampaikan pembelaannya secara lisan. Antonius mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.

“Saya berjanji tidak akan mengulangnya. Saya juga meminta maaf kepada semua pihak yang telah terluka akibat perbuatan saya, terutama umat muslim di seluruh Indonesia,” ucapnya lirih.

Selama persidangan, warga Jakarta Timur kelahiran Manado itu terlihat cukup tenang. Sempat terjadi insiden di awal sidang saat salah seorang pengunjung tiba-tiba menyeruak dari pintu samping dan berusaha memukul terdakwa. Akibat kejadian itu, sidang yang baru berlangsung lima menit terpaksa diskors. Terdakwa langsung diamankan di dalam mobil Brimob. Setelah massa tenang, sekitar setengah jam kemudian sidang kembali dilanjutkan.

Dari fakta yang terungkap di pengadilan, Antonius terbukti membagikan buku yang berisi penistaan agama. Antonius ditangkap oleh dua warga Kelurahan/Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung pada tanggal 23 Oktober 2010 saat sedang menjalankan aksinya di sekitar tempat tinggal mereka.

Dia kemudian dibawa ke rumah ketua RW. Antonius melarikan diri, namun ditangkap kembali oleh warga dan diserahkan ke Mapolsek Kranggan. Selanjutnya dia diproses hukum hingga divonis di pengadilan. (Amelia Hapsari-59)

Suara Kedu

12 Februari 2011

Kerusuhan Dipicu Pihak Luar

TEMANGGUNG - Gerakan Pemuda Kabah (GPK) menyatakan kerusuhan Selasa (8/2) dipicu pihak luar Temanggung.

Ormas ini berharap, kepolisian serius dalam mengusut masalah tersebut agar masyarakat tidak dicap sebagai perusuh.

Saat dikonfirmasi, Ketua GPK Temanggung Farid Ibrahim tidak menampik bahwa organisasinya memang terlibat dalam aksi unjuk rasa sidang pembacaan vonis yang berujung pada kerusuhan.

Namun dia menolak jika disebut ormasnya telah merencanakan tindakan yang di luar batas. "Sekalipun terlibat, kami rutin berkoordinasi dengan aparat untuk turut menjaga keamanan," katanya.

Pihaknya menyatakan prihatin dan minta maaf atas kerusuhan tersebut. Diakuinya, bukan hanya kali ini anggota ormasnya terlibat unjuk rasa menyerukan penegakan hukum. Namun selama ini, aksi mereka aman dan massa mudah dikendalikan.

Sangat Banyak "Aksi Selasa lalu, banyak kelompok dari luar daerah seperti Solo dan Pekalongan yang terlibat sehingga kami kesulitan koordinasi," kata dia tanpa menyebut nama kelompok yang dimaksud.

Apabila dalam penyidikan nanti ada anggota yang ditetapkan sebagai tersangka, dia menegaskan tidak akan lepas tangan. Organisasinya akan mengupayakan bantuan hukum dan terus melakukan pendampingan.

Di sisi lain, dia menyayangkan sikap ketidakprofesionalan polisi saat menghadapi massa. Menurut dia, situasi memanas karena sikap emosional polisi yang antara lain ditunjukkan dengan makian dan pukulan terhadap sejumlah pengunjuk rasa.

"Ke depan saya berharap atasan polisi mampu memperbaiki kinerja, sehingga bisa bersikap lebih dewasa saat menghadapi persoalan di lapangan," tandasnya.

Kalangan pemuda Kabah juga menyayangkan kekurangsiagaan polisi dalam menjaga fasilitas gereja saat aksi berlangsung. Padahal dari kronologi awal sudah jelas terbaca bahwa pemicu masalah berkaitan dengan kasus pidana penistaan

agama. Dengan demikian, polisi seharusnya menyiapkan langkah dengan menempatkan lebih banyak anggota di lokasi rawan. (J1-61)



Berita Utama
10 Februari 2011

Uluran Tangan yang Menyejukkan

ROMBONGAN beberapa mobil berhenti dan parkir di depan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) di Jalan S Parman Temanggung, pagi kemarin. Seorang penumpang mobil yang menggunakan peci dan berbalut baju putih turun diikuti rekan-rekannya, yang sebagian memakai jaket hijau berlambang Pemuda Ansor serta lainnya berseragam ala militer, dengan bertuliskan Banser.

Sejenak kemudian mereka memasuki pintu gerbang gereja itu, dan setelah memperkenalkan diri serta minta izin kepada aparat kepolisian serta TNI yang berjaga-jaga di halaman tempat peribadatan itu, mereka pun masuk ke pintu samping bangunan gereja dan berjalan terus ke belakang.

Di bagian belakang gedung itu, sejumlah jemaat tengah bekerja bakti membersihkan bangkai mobil dan sepeda motor yang dibakar dalam kerusuhan Selasa (8/2) lalu. Para jemaat yang sedang bersih-bersih terlihat agak kaget dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya rombongan yang datang.

Setelah orang yang berpeci dan mengenakan kemeja putih itu memperkenalkan diri, bahwa dia adalah Nusron Wahid, Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dan datang bersama rombongan untuk ikut bersimpati atas "musibah" yang terjadi barulah rasa penasaran itu hilang.

"Terima kasih atas perhatian dan kedatangannya, mudah-mudahan membawa berkah," kata salah seorang pengurus GPDI, Andrea, dengan ramah sembari tersenyum penuh persahabatan.

Perbincangan hangat pun kemudian terjadi di antara sejumlah pengurus gereja dengan rombongan itu, yang antara lain tampak Ketua GP Ansor Jateng Jabir Al Faruqi dan Ketua GP Ansor Temanggung, Yami Blumut. Mereka meninjau bagian bangunan yang rusak, karena terkena api dari kendaraan yang dibakar.

"Kami ingin menanyakan, apa yang bisa anggota kami lakukan untuk membantu memulihkan kondisi gereja ini. Anggota kami siap menyumbangkan tenaga untuk menjadi relawan memulihkan gereja ini," ungkap Nusron.

Uluran tangan itupun disambut dengan hangat Andrea dan pengurus gereja lainnya. Beberapa pengurus gereja dan GP Ansor Temanggung kemudian saling bertukar nomer ponsel, layaknya sahabat, untuk keperluan koordinasi. Dan, dari anggota Ansor sepakat untuk membantu membersihkan dan memperbaiki bangunan gereja yang rusak, mulai Kamis (10/2) ini.

"Selain tenaga, kami siap membantu uang untuk membeli cat, yang penting saling berkomunikasi. Termasuk, besok-besok kalau ada ancaman perusakan lagi, silakan kontak kami," tegas Nusron.

Permulaan yang serupa juga terjadi ketika rombongan tersebut mengunjungi

kompleks Graha Shekinah, yang di dalamnya terdapat play group serta sekolahan SD, SMP dan SMA. Kepala SD dan SMP Yayasan Shekinah, Natalia Ari Kartika, yang tengah menunggu para pekerja melakukan perbaikan bagian bangunan yang rusak karena kerusuhan sehari sebelumnya, bahkan bergeming ketika rombongan itu datang.

Baru, ketika rombongan itu masuk ke dalam ruangan gedung, dia buru-buru mengejanya, dan menanyakan maksud kedatangannya. Setelah berkenalan, perbincangan pun terjadi di antara mereka, sambil mengamati bagian-bagian bangunan yang rusak. "Ya, kami sangat berterima kasih, kalau akan dibantu, sehingga proses perbaikan ini menjadi lebih cepat," ujarnya.

Dia mengatakan, siswa di sekolahannya tidak hanya dari anak-anak penganut Nasrani saja, namun tidak sedikit yang muslim. Bahkan, ada siswa muslim yang sekolah di sana sejak play group hingga SMA. "Meski sekolah ini dirusak, kami sama sekali tidak merasa benci atau dendam kepada pelakunya. Bahkan, dari awal sudah kami maafkan," tutur dia.

Dia menambahkan, hingga Minggu (13/2) siswanya diliburkan karena bangunan diperbaiki. Sedangkan ketika kerusuhan, siswa kebetulan diliburkan karena guru dan pengurus yayasan rapat. "Kami beritahu para siswa kalau diliburkan hingga Minggu lewat SMS kepada orang tua masing-masing," jelasnya.

Uluran tangan dari GP Ansor yang disambut dengan hangat dan rasa damai itu, serasa memberikan kesejukan hubungan antaragama di Temanggung. Sekaligus menghapus kesan bahwa kerusuhan yang terjadi tersebut adalah konflik antaragama. (Henry Sofyan-35)

Berita Utama

18 Februari 2011

Forum Ulama Jenguk Sihabudin di Tahanan

- Kasus Temanggung

SEMARANG - Sejumlah kiai yang tergabung dalam pengurus Robithotul Ulama (Forum Ulama) Jawa-Madura, Kamis (17/2) siang, mendatangi Mapolrestabes Semarang. Mereka datang untuk menjenguk Sihabudin (46), salah satu tersangka kasus kerusuhan di Temanggung, yang terjadi Selasa (8/2) pekan lalu.

Rombongan delapan orang kiai yang dipimpin Kiai Saad Ahmad Sungkar tiba di Mapolrestabes Semarang sekitar pukul 12.00. Para kiai tidak bisa langsung menemui Sihabudin, pemimpin Pondok Pesantren Al-Hadist, Desa Kebundari, Kecamatan Wonobojo, Temanggung, karena harus melalui sejumlah prosedur.

Baru setengah jam kemudian, rombongan bisa menjenguk tokoh yang diduga sebagai penggerak kerusuhan di Temanggung tersebut. Namun, mereka tidak bisa bertemu secara langsung karena tersangka tak diizinkan keluar dari sel. Sihabudin berbincang dengan para tamunya itu dari balik jeruji. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam dalam penjagaan ketat polisi. "Kami kesini untuk bersilaturahmi, mengetahui kondisinya, sekaligus memberikan dukungan terhadap Sihabudin yang juga Ketua Robithotul Ulama Jawa-Madura," kata Said Ahmad Sungkar dari Pekalongan.

Dia menyatakan polisi hendaknya tidak hanya mengusut kasus kerusuhan Temanggung, tetapi juga menyelidiki terdakwa Antonius Richmond Bawengan yang melakukan penistaan agama. Dia mendesak, polisi mengusut jatidiri Antonius dan apakah ada orang di belakangnya, termasuk soal buku yang disebarkan terdakwa.

"Saya berharap kepolisian menyelidiki pernyataan anggota DPR Abdul Kadir Karding yang menyatakan kerusuhan Temanggung dilakukan oleh orang kiriman dari Pekalongan dan Solo. Dia harus bisa membuktinya pernyataannya. Siapa yang dikirim dan siapa yang mengirim. Polisi harus mengusut ucapan tersebut," tegasnya.(H36,K16-35)

Suara Kedu

10 Februari 2011

Jaga Kerukunan Beragama, Saling Asah, dan Asuh

MAGELANG - Dengan mengedepankan saling asah, asih, dan asuh antarumat beragama yang selama ini dilaksanakan di Magelang, diharapkan peristiwa yang terjadi di Temanggung, Selasa (8/2) tidak akan merembet ke Magelang.

"Mudah-mudahan di Magelang tidak terjadi. Namun kami juga perlu mengantisipasinya," kata Penasihat Paguyuban Umat Beriman Magelang (PUBM), KH Ahmad Dahlan HP, kemarin.

Selain itu, umat beragama di Magelang juga mengedepankan rasa tepo seliro dan ojo dumeh. "Umat beragama di sini saling menghargai serta memberi simpati dan empati. Juga tidak mentang-mentang yang mayoritas merendahkan yang minoritas," ujarnya.

Dia menerangkan, PUBM berdiri tahun 1999. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan dengan latar belakang agama, suku, antargolongan, dan sebagainya. Organisasi kolektif kolegal itu beranggotakan para tokoh agama dan kepercayaan.

Penasihat untuk agama Islam, lanjut Dahlan, selain dirinya juga KH Yusuf Chudlori. Penasihat agama Katolik adalah Romo Krisno dari Gereja Ignatius dan Sudarmono. Dari agama Kristen adalah Pendeta Parlaen. Penasihat agama Hindu Ketut K, Khonghucu adalah David Herman Jaya, serta penasihat Aliran Kepercayaan Sugeng Ilyas.

"Kami tidak hanya melakukan koordinasi di tingkat atas (pengurus PUBM), tetapi juga menyampaikan kepada jemaahnya masing-masing. Bahkan ketika perayaan hari besar keagamaan, kami saling berkunjung. Seperti saat perayaan Imlek, kami mengunjungi mereka yang merayakannya," terangnya.

Juga ketika perayaan Natal, anggota Banser ikut membantu mengamankan semua gereja dan kegiatan lainnya. Dengan cara itu kerukunan antarumat beragama di Magelang terjalin dengan baik. (P60-69)

Suara Kedu

11 Februari 2011

Kerusuhan Dipengaruhi Politik dan Ekonomi

- Ada Pihak yang Memanfaatkan

YOGYAKARTA - Berbagai kerusuhan selama ini sebenarnya bukan semata-mata karena masalah agama dan keyakinan. Konflik internal umat beragama dipengaruhi juga oleh faktor politik dan ekonomi sebagai alat pemicunya.

"Ada pihak yang memanfaatkannya. Kenapa di Indonesia yang menghargai kemanusiaan bisa muncul kekerasan atas dasar agama?" tanya Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Musa Asyarie, di Yogyakarta, kemarin.

Dia berharap, alat negara harus mampu bertindak di lapangan untuk mencegah aksi kekerasan. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengeluarkan perintah untuk menindak tegas setiap pelaku kekerasan.

Polisi dinilai sudah sepatutnya bekerja dalam koridor hukum. Tindakan tegas diperlukan, karena sudah ada undang-undang yang memberikan amanat untuk penegakan hukum.

"Tapi memang realitas dalam masyarakat ada rasa ketidakadilan, kemiskinan, dan kesenjangan yang cukup kompleks. Saya juga heran kenapa petugas kurang tegas menindak pelaku kekerasan," katanya.

Dianggap Sesat Guru Besar Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga itu menilai, acuan SKB tiga menteri soal Ahmadiyah sudah cukup sebenarnya untuk menjadi pedoman. Karena seharusnya kelompok Ahmadiyah menjadi aliran agama tersendiri.

Masalahnya hingga kini masih menjadi bagian dari komunitas yang dianggap sesat oleh mayoritas muslim di Tanah Air.

"Masalahnya Ahmadiyah tetap declare sebagai Islam, ini pro dan kontranya. Tapi apa pun keyakinan agama seseorang seharusnya mendapat perlindungan negara," tuturnya.

Ke depan, pelaku kekerasan memang harus ditindak sesuai dengan perbuatannya. Untuk menekan aksi-aksi kekerasan, bisa dilakukan melalui jalur pendidikan, memperdalam kajian soal keagamaan dari sudut pandang yang komprehensif, dan tidak hanya agama dipahami sebagai ajaran yang formal semata.

"Inti agama itu menebarkan kedamaian, umat harus lebih mendalami ajaran agama masing-masing. Jangan sebatas kulitnya saja," harapnya.

Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Prof Muhadjir Darwin mengatakan, konsep kewargaan yang universal tidak ada lagi dalam konteks demokrasi di Indonesia. Kehadiran kekerasan terhadap pemeluk agama yang berbeda setidaknya-tidaknya mengindikasikan hal tersebut.

Menurutnya, posisi negara yang lemah dimanfaatkan atau dipakai kelompok

yang berseberangan dengan hak-hak asasi manusia dan demokrasi. Kondisi dewasa ini disebutkannya menghilangkan kesempatan berdemokrasi di Tanah Air.

Khusus soal relasi praktik demokrasi dengan pemikiran Islam memang butuh pembicaraan khusus. (sgt-55)



Berita utama

16 Februari 2011

Menteri Agama Dituntut Mundur

TEMANGGUNG- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menuntut Menteri Agama Suryadharma Ali segera mundur karena dinilai berulang kali gagal membina kerukunan beragama.

Di bawah Suryadharma, eskalasi konflik berbaur SARA semakin meluas. Terakhir kali, kerusuhan pecah di Temanggung yang mengakibatkan perusakan gereja. Juga muncul penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Pandeglang, Jabar.

Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Wakil Ketua DPD RI Laode Ida, Ketua Komite III DPD Istisbaroh, anggota Komite IV DPD Poppy Susanti Dharsono, anggota Komite I DPD Denty Eka Widhi, Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding beserta jajarannya ke Temanggung, Senin (14/2). Mereka diterima oleh Bupati Temanggung Hasyim Afandi, Kapolres AKBP Kukuh Kalis, Dandim 0706 Letkol Inf Zainudin, Kajari Agus Budi Santoso, dan jajaran pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Temanggung di ruang Loka Bhaktipraja Setda.

Selain berdialog, dalam kesempatan tersebut, rombongan mengunjungi lokasi kerusuhan, yakni Sekolah Shekina, Gereja Katholik Santo Petrus Paulus Jl Jenderal Sudirman, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jl Letjend S Parman. Mereka terkejut melihat kondisi GPdI yang rusak parah di bagian garasi belakang.

Seperti diketahui, lokasi tersebut merupakan objek pengrusakan paling parah, di antaranya tiga mobil hangus terbakar.

Laode Ida menuturkan, dibutuhkan orang yang ahli menangani konflik agama di jajaran Kementerian Agama.

"Jelas, peristiwa kerusuhan ini tanggung jawab Menteri Agama," ungkapnya.

Meningkat Menurutnya, Menteri Agama selama ini belum mengkoordinir dengan baik kegiatan dialog umat beragama. Akibatnya, kegiatan itu hanya berjalan normatif dan hanya melibatkan kalangan elite agama.

"Saya heran, kenapa hanya para pemuka agama yang rukun, tapi para umat sebaliknya," tambahnya.

Anggota Komite IV DPD Poppy Susanti Dharsono menyoroti beberapa keganjilan dalam kerusuhan Temanggung.

"Harus segera dicari akar permasalahan hingga langkah antisipasi selanjutnya.

Sebagai wakil dari Jateng, saya amat mengenal karakter masyarakat Temanggung yang mayoritas adalah petani. Rasanya tidak mungkin mereka menumpahkan kemarahan dengan membakar gereja, tanpa ada yang memprovokasi. Ini sungguh memprihatinkan," katanya.

Menurutnya, pemerintah kurang tanggap dalam mengemban amanat kebangsaan

yang menganut prinsip Bhineka Tunggal Ika.

”Kerusuhan berbasis SARA bukan kali pertama terjadi. Untuk itu, pemerintah sebagai pemegang mandat kedaulatan rakyat, harus bertanggung jawab. Selain itu, perlu diambil langkah antisipasi terhadap berbagai bentuk ancaman terhadap kebhinekaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding menjelaskan, dalam setahun terakhir, kasus kekerasan mengatasnamakan agama, semakin banyak. Mulai tahun 2007 sampai sekarang sudah ada 362 kasus kekerasan.

”Ini bukti bahwa Menteri Agama telah gagal dan perlu dievaluasi secepatnya. Akar masalah dan solusi kasus kekerasan atas nama agama seperti di Temanggung, harus segera dicari, sebab bisa mengalami eskalasi dan meluas,” kata dia.

Politikus PKB itu juga mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelumnya, sudah ada pembicaraan antara pihaknya dengan Kapolri dan Kementerian Agama, terutama untuk mencari apa solusinya. Diharapkan, kepolisian benar-benar mengungkap secara tuntas dan menyeluruh, terutama dalang dibalik kerusuhan dan motifnya. (H70,dit-43).

Hukum

1 Maret 2011

Dewan Desak Tersangka Dipindah ke Temanggung

- MUI Jateng Jenguk Tersangka

SEMARANG- Dengan alasan kemanusiaan, sejumlah kalangan mendesak polisi segera memindahkan tersangka kerusuhan Temanggung yang ditahan di Polda Jateng dan Mapolrestabes Semarang untuk ditangani di Temanggung. Dengan penahanan di Semarang, pihak keluarga merasa kesulitan dan keberatan dari sisi jarak tempuh maupun biaya.

Hal itu terungkap dalam rapat antara Komisi A DPRD Temanggung dan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) yang diterima Komisi A DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang, Senin (28/2).

Rombongan dari Temanggung dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhamdi dan diterima Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat beserta anggota. Menurut Muhamdi, persoalan kerusuhan di Temanggung harus diusut tuntas oleh polisi termasuk mengungkap dan menangkap aktor intelektual di balik kerusuhan itu. Dikatakan, aktor intelektual bukan hanya dalang atas kerusuhan yang terjadi di lapangan pascapersidangan, namun juga siapa yang mendatangkan Antonius Richmond Bawengan yang melakukan penistaan agama.

“Siapa di balik Antonius juga harus diungkap tuntas. Seluruh tersangka berasal dari Temanggung, padahal polisi juga tahu kalau banyak yang terlibat justru berasal dari luar daerah,” terangnya.

Sekretaris FUIB Temanggung, Taufan Sugianto menyatakan para tersangka berasal dari daerah miskin di pinggiran Temanggung yang notabene kesulitan dari sisi ekonomi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang setiap harinya harus menghidupi keluarga.

“Kami mengetuk hati nurani para pejabat agar mereka (tersangka-red) diproses hukumnya di Temanggung. Kasihan keluarganya, kalau mau menjenguk harus menjual ayam atau ternak lain untuk sekadar ongkos ke Semarang,” tuturnya.

MUI Jateng

Fuad Hidayat menyatakan, secara formal pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti polisi, kejaksaan, maupun pengadilan untuk memantau perkembangan kasus itu. Politikus PKB itu menegaskan, Komisi A akan membela para tersangka tersebut secara politik.

“Kami berharap panjenengan terus berkoordinasi dengan kami guna melakukan pembelaan terhadap para tersangka,” jelasnya.

Usai pertemuan dengan Komisi A, rombongan dari Temanggung menjenguk para tersangka di Polda Jateng. Sebelumnya, rombongan Majelis Ulama

Indonesia (MUI) Jateng juga menjenguk Sihabudin, tersangka kerusuhan Temanggung. Rombongan datang menggunakan bus dan menuju ruang tahanan Mapolrestabes Semarang, Senin (28/2) sekitar pukul 11.00.

Rombongan tak terlalu lama di ruang tahanan. Ketua MUI Jateng, KH Ahmad Daroji usai menjenguk mengatakan, dia berharap kepolisian segera mengungkap dan mengusut tuntas kasus kerusuhan dan penistaan agama tersebut.

“MUI akan terus mendorong penyelesaian kasus Temanggung secara damai,” ujar Ahmad Daroji.

Ditambahkannya, dia menyarankan kepada Sihabudin untuk segera menunjuk kuasa hukum agar proses penyidikan tidak berkepanjangan dan ditunda-tunda.

Dengan demikian, proses hukum bisa berjalan sesuai prosedur. (H23,H21-43)



Berita Utama
21 Februari 2011

“Ada yang Senang kalau Indonesia Ribut”

TEMANGGUNG - Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali menyatakan keprihatinannya atas terjadinya tindak kekerasan yang bernuansa masalah agama di beberapa daerah. Peristiwa itu semestinya tak perlu terjadi, karena kekerasan bukan watak umat beragama. Tidak ada agama yang mengajarkan dan membenarkan kekerasan. Menag menengarai ada pihak yang senang atas terjadinya berbagai kekerasan dan kerusakan di Tanah Air.

Hal itu diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja dan dialog dengan muspida, tokoh masyarakat, dan pemuka agama di kantor bupati Temanggung, Minggu (20/2).

”Saya mencermati, ada pihak yang senang kalau Indonesia ribut. Ada pihak yang senang kalau konflik sosial terjadi di mana-mana dan kadarnya berat,” katanya.

Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak, khususnya pemuka agama, untuk menyesuaikan suasana, karena masyarakat memerlukan ketenangan.

Bantuan untuk Gereja Suryadharma berharap ke depan fungsi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dioptimalkan, karena forum itu sangat positif. Efektif atau tidaknya forum itu tergantung peran para tokoh agama itu sendiri. Maka dari itu, FKUB harus melakukan kegiatan-kegiatan rutin meski tidak ada masalah.

Dalam kunjungan tersebut Kementerian Agama memberikan bantuan kepada sejumlah gereja yang menjadi korban kerusakan. Gereja Pantekosta di Indonesia (GPiD) Temanggung mendapat bantuan Rp 125 juta, Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Rp 100 juta, Gereja Pantekosta Tegowanuh Rp 50 juta, Sekolah Kristen Grha Shekinah Rp 75 juta, dan Badan Kerja Sama Antar-Gereja (Bamag) Rp 25 juta. (dit-59)

Berita Utama

24 Februari 2011

Berkas Rusuh Temanggung Segera Dilimpahkan

SEMARANG- Berkas pemeriksaan 25 tersangka kerusuhan di Temanggung dalam waktu dekat akan dilimpahkan penyidik Polda ke Kejaksaan Tinggi Jateng. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah hasil penyidikan dinyatakan selesai. Dengan demikian, jika berkas dinyatakan sudah lengkap oleh Kejaksaan, kasus tersebut akan segera disidangkan.

“Berkas pemeriksaan tersangka dibuat terpisah. Ada beberapa yang sudah selesai, sehingga bisa segera dilimpahkan ke kejaksaan,” kata Kapolda Jateng Irjen Edward Aritonang, Rabu (23/2).

Sementara terkait dengan pengajuan penangguhan penahanan para tersangka, Kapolda mengatakan bahwa hal tersebut merupakan wewenang dari penyidik kepolisian.

“Meskipun menjadi wewenang penyidik, kami menerima laporan ada hal-hal yang bisa mengganggu proses penyidikan. Itu menjadi bahan pertimbangan kami jika para tersangka ditanggguhkan penahanannya. Apalagi jumlah tersangka dan barang bukti kemungkinan masih bisa bertambah,” ujar Kapolda.

Kapolda telah meminta pengadilan agar persidangan nantinya bisa dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang. Itu untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga dimaksudkan untuk memudahkan proses persidangan serta menjaga situasi yang kondusif di Temanggung.

Menurut Kapolda, hingga saat ini belum ada penambahan jumlah tersangka dalam kerusuhan di Temanggung. Saat ini jumlah tersangka masih 25 orang. Seperti diberitakan, kerusuhan di Temanggung terjadi pascasidang vonis kasus penistaan agama dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan di Pengadilan Negeri Temanggung, pada 8 Februari lalu. Terdakwa dijatuhi hukuman 5 tahun.

Ratusan orang tak puas dengan keputusan majelis hakim yang dianggap ringan. Terjadi kericuhan dan ujung-ujungnya berbuntut pada kerusuhan massal. Sejumlah bangunan rumah ibadah, gedung, dan kendaraan dirusak. Polisi menangkap 25 orang dan ditetapkan sebagai tersangka. Sebanyak 23 orang dibawa ke Mapolda Jateng, sedangkan dua orang yakni Syihabudin dan Lutfi Hakim Aziz ditahan di Polrestabes Semarang.

Bukan Yehovah Sementara itu, Ketua Pengurus Saksi-saksi Yehovah, Swandrio Eko Putro menjelaskan bahwa terpidana kasus penistaan agama di Temanggung, Antonius Richmond Bawengan, bukan pengikut Saksi Yehovah.

”Kami perlu menyampaikan hal ini kepada masyarakat luas, sebab pernyataan yang dibuat seorang tokoh agama di Jateng tentang status keagamaan terpidana, yang dimuat di sebuah harian terbitan Jakarta dan juga beredar di internet, telah memperkeruh suasana dan menyebabkan keresahan di kalangan umat Kristen Saksi Yehovah,” kata Swandrio dalam rilis yang dikirimkan ke Suara Merdeka,

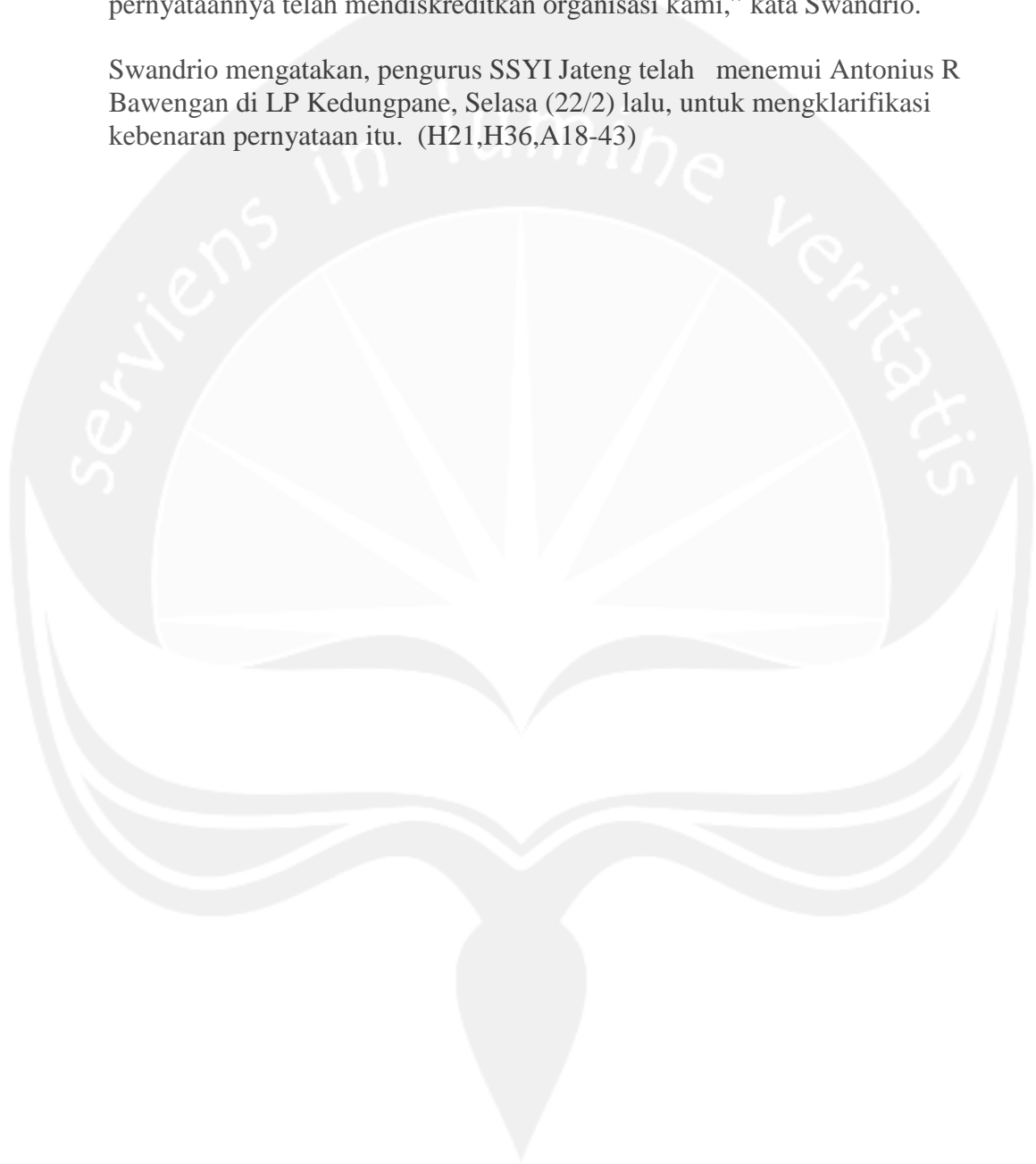
Rabu (23/2).

Dalam rilis yang juga ditandatangani sekretaris Kristanto Budi Santosa itu, Saksi Yehovah menyesalkan pernyataan tokoh agama tersebut.

Apalagi pernyataan itu mengatasnamakan Komisi Hubungan Antar-Agama dan Kepercayaan (HAK) Keuskupan Agung Semarang.

”Kami sudah mengirimkan surat kepada tokoh agama yang bersangkutan dan kami meminta beliau meminta maaf secara terbuka melalui media massa, karena pernyataannya telah mendiskreditkan organisasi kami,” kata Swandrio.

Swandrio mengatakan, pengurus SSYI Jateng telah menemui Antonius R Bawengan di LP Kedungpane, Selasa (22/2) lalu, untuk mengklarifikasi kebenaran pernyataan itu. (H21,H36,A18-43)



Berita Utama

19 Februari 2011

Warga Datangi Mapolda

- Minta 17 Tersangka Rusuh Temanggung Dibebaskan

SEMARANG - Puluhan warga Desa Sigedong, Kecamatan Tretep, Temanggung, Jumat (18/2) mendatangi Mapolda Jateng di Jalan Pahlawan.

Mereka meminta belas kasih polisi agar segera membebaskan 17 tersangka kasus kerusuhan Temanggung dari 22 orang yang ditahan di Mapolda. Para tersangka dipindahkan ke Mapolda Jateng 12 Februari lalu dengan alasan untuk mempermudah penyidikan. Dua tersangka lain yakni Sihabudin dan Lutfi Hakim Azis ditahan di Mapolrestabes Semarang.

Puluhan warga tersebut datang dipimpin Kepala Desa Sigedong, Jariah. Menurut Jariah, para tersangka kerusuhan Temanggung yang dipindahkan ke Mapolda sebagian besar masih remaja dan menjadi tulang punggung keluarga. "Saya mewakili pihak keluarga berharap 17 orang yang ditahan bisa ditangguhkan dan dibebaskan. Mereka hanya menjadi korban dan diajak Sihabudin," kata dia.

Jariah menjelaskan, sebulan sekali Sihabudin datang ke Sigedong. Kiai itu berdakwah di sejumlah masjid setempat. Sihabudin, lanjut Jariah, beberapa kali melalui pengeras suara mengajak warga untuk melihat langsung sidang penistaan agama yang digelar di PN Temanggung.

Mereka yang masih ditahan di Mapolda, tambah Jariah, merupakan warga Desa Sigedong. Sehari-hari para tersangka bekerja sebagai buruh tani, kuli bangunan, dan penebang tebu.

Kemarin, suasana haru dan isak tangis mewarnai pertemuan antara para tersangka dengan keluarga. Pertemuan dibatasi hanya lima warga dan berlangsung tertutup bagi wartawan. Sejumlah keluarga tersangka tidak kuasa menahan tangis setelah menjenguk keluarganya.

Nastiti misalnya. Warga Sigedong yang masih pengantin baru itu mengaku sedih lantaran harus berpisah dengan suaminya, Nurhamid, yang ikut menjadi tersangka. Dia mengaku sedang hamil dua bulan.

"Suami saya tidak tahu apa-apa. Dia hanya ikut-ikutan," kata Nastiti.

Tidak Tegas

Kapolda Irjen Pol Edward Aritonang ditemui se usai membuka acara Kemah Bhakti Kemitraan di Lapangan Mako Sat Brimob Polda Jateng di Srandol, Jumat (18/2) sore, kembali menegaskan, pihaknya akan menyelidiki jatidiri Antonius Richmond Bawengan, terdakwa kasus penistaan agama yang dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk mengetahui siapakah sebenarnya Antonius," kata Kapolda.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pemuda

Muhammadiyah Jateng menilai, pemerintah tidak tegas dan konsisten dalam menyelesaikan kerusuhan horizontal di Temanggung. Terbukti, hingga kini akar masalah dan penyulut kerusuhan itu belum terungkap. Padahal, kalau tidak segera diselesaikan, ini bisa menjadi bom waktu yang mengganggu stabilitas.

Kesimpulan tersebut merupakan hasil investigasi PWM dan Pemuda Muhammadiyah yang disampaikan kepada para wartawan di ruang rapat PWM Jateng Jl Singosari, Jumat (18/2).

Ketua PWM, KH Drs Musman Tholib MAg menyimpulkan, kerusuhan di Temanggung disebabkan oleh selebaran buku yang berisikan ajaran penistaan terhadap agama Islam.

Selain menerjunkan tim di lokasi kerusuhan, pihaknya juga mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang diduga mengetahui proses kerusuhan, termasuk dari Forum Umat Islam Bersatu Temanggung.

"Peristiwa itu sangat mengganggu kerukunan intern dan antarumat beragama," katanya didampingi Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jateng, Rohmat Suprpto SAg MSI dan Wakil Sekretaris PWM, Drs Wahyudi MPd. Pihaknya menuntut pemerintah menghukum seberat-beratnya provokator dan penyulut konflik. (H36,H21,H70-43)

Semarang Metro

14 Juni 2011

840 Personel Kawal Sidang Sihabudin

SEMARANG- Terdakwa utama kasus kerusuhan temanggung, Sihabudin akan menjalani sidang pembacaan vonis, Selasa (14/6) hari ini di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Tak mau kecolongan, Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengerahkan pengamanan maksimal dengan menerjunkan 840 personel gabungan. Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Djihartono mengatakan, dari jumlah personel tersebut, 422 personel disiagakan untuk mengawal jalannya persidangan di PN Semarang dan kantor sekitarnya. Sedangkan 238 personel siaga di markas.

Personel tersebut merupakan gabungan kekuatan dari Polda Jateng dan Polrestabes Semarang. Selain itu, masih ada 180 personel yang siap diperbantukan dari Brimob dan Dalmas. "Jika sewaktu-waktu dibutuhkan pasukan tersebut siap on call," katanya, Senin (13/6) kemarin.

Jalur Alternatif

Namun Djihartono belum bisa memperkirakan berapa jumlah pendukung Sihabudin yang akan menghadiri persidangan. Selain menyiagakan personel, polisi juga akan menyiapkan jalur alternatif untuk arus lalu lintas di sekitar lokasi sidang.

"Sementara masih akan menggunakan jalur utama. Tapi kami juga sudah mempersiapkan jalur alternatif," ujarnya.

Selain Syihabudin, tujuh terdakwa kasus kerusuhan Temanggung juga akan menjalani vonis. Sihabudin didakwa sebagai provokator dan penghasut dalam kerusuhan yang terjadi pada 8 Februari 2011 lalu di PN Temanggung. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Sihabudin dihukum satu tahun penjara.

Pada kasus kerusuhan Temanggung ini, PN Semarang menyidangkan 25 terdakwa.

Sebanyak 16 terdakwa telah divonis lima bulan penjara dan satu terdakwa lainnya dijatuhi hukuman empat bulan pada sidang yang digelar Kamis (9/6) lalu. (H68,H21-72)

Hukum

10 Juli 2011

Banyak PR untuk Kapolda Baru

DALAM kurun enam bulan pertama tahun 2011 ini, jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah dibuat sibuk oleh beragam kasus kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan (curas) atau yang lazim disebut perampokan masih mendominasi dalam satu semester ini. Selain itu, kasus menonjol yang menjadi perhatian adalah perjudian, penganiayaan dan penyalahgunaan narkoba.

Menghadapi curas, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrim) Polda Jateng berhasil mengungkap dan menangkap empat anggota dari komplotan perampok toko emas lintas provinsi. Di Jateng, komplotan ini pernah beraksi di tiga wilayah, yakni Wonosobo, Banjarnegara, dan Purbalingga, dengan mengasak 14 kg emas.

Komplotan perampok yang dikenal sadis ini dibekuk di beberapa tempat terpisah: Wonosobo, Medan dan Jakarta. "Komplotan ini dalam beraksi bekerjasama dengan kelompok lokal. Mereka sempat merepotkan kami, tapi akhirnya berhasil ditangkap, meski harus memburunya sampai ke Medan," kata Direskrim Kombes Pol Bambang Rudi Pratiknyo didampingi Wadireskrim AKBP Achmad Yudi Suwarso.

Namun dengan penangkapan itu bukan berarti polisi bisa berleha-leha. Sebab otak kelompok ini belum tertangkap. Pemimpinnya yang disebut kapten, masih diburu sampai sekarang. Daftar pekerjaan rumah masih panjang dengan masih maraknya kejahatan jalanan (street crime). Meski 311 kasus dengan 484 tersangka sudah diungkap. Nyatanya dalam seminggu terakhir ini masih terdapat laporan street crime dengan modus menuduh korbannya sebagai pelaku tabrak lari di sepanjang jalur Semarang-Ungaran.

Perjudian, terutama toto gelap (togel) atau kuda lari yang kembali marak, sempat membuat Polda menjadi sorotan. Serangkaian operasi sempat membuat publik percaya bahwa kepolisian serius memberantas penyakit masyarakat ini. Data dari Direskrim Polda Jateng, sebanyak 245 kasus perjudian dengan 499 tersangka diungkap dalam kurun Januari-Juni 2011. Barang bukti yang diamankan uang tunai Rp 5,7 juta, 2 buah buku togel, 13 lembar rekapan nomor, 14 set kartu remi, tiga set kartu ceki, 3 set kartu domino, 20 ekor ayam jago, 127 buah gelang plastik, 1 buah ring sabung ayam, 7 buah tikar, 8 buah handphone, 35 unit sepeda motor, dan empat mobil.

Tapi mereka yang ditangkap baru sebatas pengecer atau bandar kecil. Bandar besar yang diduga mengendalikan para pengecer belum terungkap. Dalam gelar kasus perjudian beberapa waktu lalu, Kapolda Jateng yang masih dijabat Irjen Pol Edward Aritonang, mengakui bahwa yang berhasil ditangkap dari 499

tersangka adalah pengedar atau pengecer, pengepul dan bandar tingkat menengah.

“Hingga sekarang, Polda Jateng sedang berupaya menyelidiki dan mengejar siapa bandar tingkat atas. Sebab setahu kami, bandar kelas atas sudah tidak ada. Kemungkinan para tersangka yang tertangkap ini adalah agen-agen perjudian terdahulu yang mengangkat dirinya sendiri menjadi bandar,” jelas Edward.

Kerusuhan Temanggung

Sementara untuk kasus penganiayaan atau tindak kekerasan secara bersama-sama, yang menjadi buah bibir ialah kasus kerusuhan di Temanggung pada 8 Februari silam. Kerusuhan dipicu ketidakpuasan massa pada keputusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Temanggung terhadap terdakwa kasus penistaan agama Antonius Richmond Bewengan. Kerusuhan mengakibatkan kerusakan pada gedung PN Temanggung, sejumlah gereja, sekolah dan kendaraan bermotor. Polisi menangkap 25 tersangka, termasuk KH Sihabudin yang dianggap sebagai otak kerusuhan. Pengadilan Negeri (PN) Semarang kemudian menjatuhkan hukuman empat hingga lima bulan penjara terhadap 24 terdakwa, sedangkan Sihabudin divonis satu tahun penjara.

Masih adanya kerusuhan massal ini harus menjadi perhatian polisi. Seperti diakui Edward Aritonang, bahwa sebagian masyarakat Jawa Tengah masih mudah tersulut, terutama menyangkut benturan antara budaya, agama, dan hukum.

Menurutnya masih ada sebagian masyarakat yang menilai budaya daerah berada di atas hukum.

“Kalau bicara budaya semua harus minggir, hukum juga harus minggir.

Solusinya kita duduk bersama, karena hukum juga lahir untuk mengatur hubungan antar masyarakat,” jelasnya.

Untuk kasus narkoba, catatan Polda dalam 3 bulan terakhir, terdapat 38 target operasi yang dipantau. Dari jumlah itu 22 target berhasil diungkap. Meski sejumlah target lepas, namun berhasil dibayar dengan pengungkapan 50 kasus non

target. Di antaranya justru kasus-kasus besar seperti penyelundupan sabu-sabu seberat 1,104 kilogram dengan tersangka warga negara Vietnam, Tram Thibich Hanh (34) yang ditangkap di Bandara Internasional Adi Soemarmo pada 19 Juni lalu. Juga kasus warga negara Filipina Cherry Ann Panaligan (26) yang ditangkap Bea Cukai Solo di Bandara Adi Sumarmo, pada 9 Mei, dengan barang bukti 1,193 kilogram heroin.

“Kami sedang melakukan evaluasi, apakah target yang dipantau sudah pindah atau memang lihai menyembunyikan diri,” ujar Kapolda Edward waktu itu.

Di luar itu, Polda Jateng juga mengungkap berbagai kasus penyakit masyarakat yang lain seperti minuman keras (miras). Sebanyak 426 kasus dengan 693 tersangka diungkap dengan barang bukti 10.782 botol dan 14.501 liter mirsa berbagai merek. Menurut Kapolda, hal ini menjadi wujud keseriusan Polda terhadap kasus yang dalam satu semester telah meminta korban jiwa 16 orang dari berbagai kota.

Catatan prestasi lain dalam enam bulan ini, yakni pengungkapan 18 dari 36 kasus perdagangan manusia (trafficking in persons) yang menjadi target dengan jumlah tersangka 53 orang. Kemudian 342 kasus pornografi dengan 366 tersangka. Kasus terbesar dari pornografi adalah peredaran VCD porno, penggandaan VCD, dan pelacuran terselubung. Yang memprihatinkan dalam masalah ini, para pelaku yang terlibat kasus pornografi sebagian besar justru masih berusia muda atau remaja.

Meski banyak prestasi yang ditorehkan, namun harus diakui banyak juga pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Ini menjadi tugas Kapolda Jateng yang baru, Irjen Pol Didiek Sutomo Triwidodo yang mewarisi tongkat komando Edward

Aritonang pada serah terima jabatan di Mabes Polri, Rabu (6/7) lalu. (Anton Sudibyo, Leonardo ABP-82)

Berita Utama
22 Februari 2011

Diduga Ada Rekayasa Kasus Cikeusik dan Temanggung

- Din: Polri Bongkar Habis

JAKARTA.- Aksi kerusuhan bernuasa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di Cikeusik, Banten dan Temanggung, diduga ada unsur rekayasa.

Kasus itu dilakukan secara rapi, terencana bahkan melibatkan orang banyak dari luar daerah. "Ini tantangan bagi aparat penegak hukum khususnya Polri untuk membongkar habis kasus itu dan menghukum aktor intelektual di balik kasus tersebut," ujar Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta, Senin kemarin.

"Saya sampai pada keyakinan, kasus kerusuhan Cikeusik dan Temanggung tidak berdiri sendiri dan disengaja pihak tertentu. Meski tak bisa membuktikan itu secara hukum, tapi begitu keyakinan saya," kata Din membuka diskusi "Masalah Kerukunan Umat Beragama dan Solusinya".

Menurut dia, kasus tersebut diduga untuk mendeskreditkan pihak-pihak tertentu, terutama umat Islam Indonesia yang selama ini dikenal ramah, sopan dan toleran. Kedua, kasus tersebut untuk mendiskreditkan tokoh lintas agama, yang selama ini mengkampanyekan gerakan kerukunan dan kerja sama antar iman.

"Atau, ada kepentingan tersembunyi lainnya seperti kepentingan politik pihak tertentu. Ahmadiyah sudah ada sejak zaman Belanda serta hidup rukun dan damai di Tanah Air. Kalau tiba-tiba bisa berbuat anarkhis begitu, maka layak dipertanyakan," kata Din diplomatis.

Oleh karena itu, Din meminta warga masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing emosi. "Jangan mudah diadu, sehingga saling berselisih dan berbuat anarkhis. Jika itu yang dilakukan, bisa merugikan kita semua," pinta putra Bima NTB itu.

Banyak Kejanggalan Selain itu, Din juga mempertanyakan, siapa sebenarnya Antonius Bawenangan, orang yang divonis melakukan penodaan agama di Temanggung tersebut. "Kita mempertanyakan, siapa sebenarnya Antonius itu? Siapa dia sebenarnya, seorang diri sampai berani menyebarkan buku dan selebaran yang berisi penistaan agama tersebut. Patut dicurigai, dia justru provokator yang sengaja memicu kerusuhan untuk tujuan tertentu," papar dia.

Pendapat serupa disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding. "Kasus kerusuhan Cikeusik dan Temanggung layak diselidiki secara mendalam, karena banyak kejanggalan ditemukan di lapangan. Tugas Polri sebagai penegak hukum untuk mengusut dan menangkap aktor utama kasus itu. Selanjutnya, hukum ditegakkan secara adil dan proporsional," kata politikus PKB itu.

Karding belum menyimpulkan siapa bermain dibalik kasus Cikeusik dan Temanggung. Dalam pertemuan dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Menteri Agama Suryadharma Ali di DPR pekan silam, belum dilaporkan secara rinci. "Jawaban Kapolri saat itu masih normatif. Kita masih menyelidiki dan Polri berjanji akan bertindak profesional. Tapi, sampai kapan kita belum tahu," aku putra Sulawesi itu.

Tapi, diakui Karding, ada indikasi kuat permainan politik dalam dua kerusuhan bernuansa SARA tersebut. "Polri sebagai alat negara harus berani mengusut tuntas sampai menemukan aktor utama serta motif dibaliknya.

Selanjutnya, hukum ditegakkan, sehingga kasus itu tidak terulang di daerah lainnya," pinta dia. (bn-80)



Berita Utama

01 Juni 2011

Dituntut Setahun, Sihabudin Marah

- Kasus Kerusuhan Temanggung

SEMARANG - Terdakwa kasus kerusuhan Temanggung, Sihabudin, marah karena tidak terima diancam tuntutan satu tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Selasa (31/5).

“Saya orang yang dizalimi dan semua yang menzalimi saya akan dilaknat Allah,” katanya disambut pekik “Allahu akbar” beberapa kali oleh puluhan pendukungnya di ruang sidang utama PN Semarang.

Seruan Sihabudin itu diucapkan ketika JPU Sugeng SH belum selesai membacakan keseluruhan naskah tuntutan. Setelah terdakwa dan pendukung ditenangkan oleh Ketua Majelis Hakim Edy Tjahjono, JPU kemudian meneruskan pembacaannya.

Memegang mikrofon, Sihabudin berbicara di hadapan puluhan pendukungnya. “Orang yang dizalimi, doanya didengar Allah. Kalau jaksa dan hakim menzalimi, pasti dapat laknat Allah.” JPU menilai Sihabudin terbukti menghasut massa sehingga menyebabkan timbulnya kerusuhan dan perusakan pada 8 Februari lalu.

Tidak Sendirian

Dalam tuntutannya, Sugeng mengatakan hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Sedangkan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi pengasuh pondok pesantren. Selain itu, kerusuhan Temanggung tidak bisa ditimpakan tanggung jawabnya kepada Sihabudin seorang.

Hal ini karena kejadian itu melibatkan ribuan orang. Sedangkan massa yang dibawa Sihabudin hanya 50 orang. “Masih banyak massa yang berasal dari kelompok-kelompok lain. Mereka belum teridentifikasi. Jadi kesalahan bukan pada Sihabudin seorang,” kata Sugeng.

Kepada wartawan, Sihabudin menjelaskan dirinya melaknat karena merasa difitnah. Ia merasa sebagai orang yang ikut mengamankan persidangan Antonius Richmond Bawengan dan justru menenangkan massa.

Dengan sidang itu, berarti telah 16 dari 25 terdakwa kerusuhan Temanggung yang masuk tahap penuntutan. Pengamanan polisi pada sidang kemarin kembali diperketat. Hal itu lantaran kehadiran ratusan pendukung Sihabudin yang berasal dari Purworejo dan Temanggung.

Polisi terpaksa menutup pintu gerbang PN Semarang dan membatasi jumlah orang di dalam ruang sidang. Pendukung Sihabudin yang tidak diizinkan masuk ruang sidang menggelar doa bersama di halaman pengadilan. (H68-43)

Berita Utama

15 Juni 2011

Tujuh Perusuh Temanggung Dihukum Lima Bulan

Divonis Setahun, Syihabudin Laknat Hakim

SEMARANG - Terdakwa kerusuhan Temanggung, Syihabudin (46), divonis satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Selasa (14/6). Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hadist Temanggung itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penghasutan di muka umum supaya orang lain melakukan perusakan. Vonis itu sama dengan tuntutan jaksa.

Atas putusan tersebut, Syihabudin menyatakan banding. Dia protes keras, bahkan melaknat hakim. Dalam sidang terpisah, tujuh terdakwa lainnya dihukum lima bulan dipotong masa tahanan. Mereka, yakni Sukeni, Nur Hamid, Suranto, Ngahatun, Muhasim, Parten, dan Nuraeni dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perusakan terhadap sejumlah fasilitas umum. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, yakni penjara selama delapan bulan. Di tengah persidangan, puluhan pendukung Syihabudin dari Temanggung menggelar istighotsah di halaman pengadilan.

Ketua Majelis Hakim Edy Tjahyono menyatakan, hasil keterangan sejumlah saksi menguatkan peran Syihabudin dalam kerusuhan saat sidang pelaku penistaan agama dengan terdakwa Antonius Bawengan di PN Temanggung pada 8 Februari 2011.

Memelintir Fakta

Syihabudin menilai keputusan hakim tidak adil karena ia merasa sama sekali tidak melakukan penghasutan. "Saya menyatakan banding karena saya tidak bersalah. Semuanya penuh rekayasa dan tidak berdasar fakta persidangan. Semoga hakim dan jaksa dilaknat tujuh turunan," ujar Syihabudin yang disambut teriakan takbir para pendukungnya.

Kuasa hukum Syihabudin, M Syahir menilai, sejak awal kliennya "dikonstruksikan" supaya bersalah. Ia menuding majelis hakim memanipulasi dan memelintir keterangan para saksi dan fakta-fakta. Untuk itulah, tim kuasa hukum akan menyusun memori banding untuk diajukan ke Pengadilan Tinggi Jateng.

Peristiwa kerusuhan Temanggung menyeret 25 terdakwa. Pada sidang yang berlangsung Kamis (9/6), 16 terdakwa divonis lima bulan penjara. Satu terdakwa lain, Suprihanto, dihukum empat bulan penjara. (J14-59)

Berita Utama

18 Februari 2011

Forum Ulama Jenguk Sihabudin di Tahanan

SEMARANG - Sejumlah kiai yang tergabung dalam pengurus Robithotul Ulama (Forum Ulama) Jawa-Madura, Kamis (17/2) siang, mendatangi Mapolrestabes Semarang. Mereka datang untuk menjenguk Sihabudin (46), salah satu tersangka kasus kerusuhan di Temanggung, yang terjadi Selasa (8/2) pekan lalu.

Rombongan delapan orang kiai yang dipimpin Kiai Saad Ahmad Sungkar tiba di Mapolrestabes Semarang sekitar pukul 12.00. Para kiai tidak bisa langsung menemui Sihabudin, pemimpin Pondok Pesantren Al-Hadist, Desa Kebundari, Kecamatan Wonobojo, Temanggung, karena harus melalui sejumlah prosedur.

Baru setengah jam kemudian, rombongan bisa menjenguk tokoh yang diduga sebagai penggerak kerusuhan di Temanggung tersebut. Namun, mereka tidak bisa bertemu secara langsung karena tersangka tak diizinkan keluar dari sel. Sihabudin berbincang dengan para tamunya itu dari balik jeruji. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam dalam penjagaan ketat polisi. "Kami kesini untuk bersilaturahmi, mengetahui kondisinya, sekaligus memberikan dukungan terhadap Sihabudin yang juga Ketua Robithotul Ulama Jawa-Madura," kata Said Ahmad Sungkar dari Pekalongan.

Dia menyatakan polisi hendaknya tidak hanya mengusut kasus kerusuhan Temanggung, tetapi juga menyelidiki terdakwa Antonius Richmond Bawengan yang melakukan penistaan agama. Dia mendesak, polisi mengusut jatidiri Antonius dan apakah ada orang di belakangnya, termasuk soal buku yang disebarkan terdakwa.

"Saya berharap kepolisian menyelidiki pernyataan anggota DPR Abdul Kadir Karding yang menyatakan kerusuhan Temanggung dilakukan oleh orang kiriman dari Pekalongan dan Solo. Dia harus bisa membuktinya pernyataannya. Siapa yang dikirim dan siapa yang mengirim. Polisi harus mengusut ucapan tersebut," tegasnya.(H36,K16-35)

Berita Utama

13 Mei 2011

Jaksa Tak Siap, Tuntutan Ditunda

- Sidang Kerusakan Temanggung

SEMARANG- Sidang untuk mengadili enam dari 25 terdakwa kasus kerusakan Temanggung di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (12/5), seharusnya memasuki penuntutan. Namun, agenda itu ditunda karena jaksa penuntut umum (JPU) belum siap.

Enam terdakwa pada perkara Nomor 197/Pid.B/2011/PN.Smg tersebut dinyatakan telah selesai pemeriksaannya pada sidang pekan sebelumnya.

Majelis Hakim Ketua Ronius dengan hakim anggota Sujatmiko dan Suyadi menjadwalkan agenda penuntutan kemarin. Namun, karena JPU tidak siap, terdakwa Ahmad Faro'i, Agus Prihanto, Aziz Zaenal Arifin, Muhammad Syaiful Mujab Rochani, Abdul Kholik dan Tarmudi Bin Sutono harus menunggu hingga pekan depan.

"Kami belum siap, Majelis Hakim. Kami minta waktu satu minggu untuk membacakan tuntutan," kata JPU Gandara dari Kejaksaan Negeri Semarang.

Hakim lantas menunda sidang hingga Kamis (19/5) pekan depan. Jaksa Gandara tak memberikan keterangan lebih lanjut ihwal ketidaksiapan berkas tuntutan tersebut. "Yang jelas hal ini sudah melalui persetujuan pimpinan," katanya. Sementara untuk 19 terdakwa lain, termasuk terdakwa utama Syihabudin, kemarin belum menginjak agenda tuntutan. Syihabudin disidang di Ruang Utama PN Semarang dengan agenda mendengar keterangan saksi.

Di antara saksi yang dihadirkan adalah Anas Tohir (30) dan Supriyanto (39). Keduanya juga menjadi terdakwa dalam kasus kerusakan ini, namun dalam berkas yang berbeda.

Hanya Ikut-ikutan

Kepada hakim, Anas mengatakan dirinya ikut bersama rombongan orang sedesanya menuju PN Temanggung tanggal 8 Februari 2010.

Di tengah jalan, diakuinya rombongan berjumlah puluhan itu sempat mampir di rumah Syihabudin.

"Kami berangkat bersama-sama naik kendaraan. Kemudian mampir dulu ke rumah Syihabudin. Saya tidak menemui beliau, tapi hanya melihat saja," ungkapnya.

Anas mengatakan dirinya hanya mengikuti ajakan ketika ikut rombongan itu. Dia mengaku tidak sedikitpun merasa khawatir karena dia mendengar kalau terjadi

apa-apa akan ada yang bertanggung jawab.

Ketika kemudian terjadi kerusuhan, Anas berfikir akan aman-aman saja karena polisi juga tidak bertindak untuk mencegah. "Ada polisi, tapi hanya berdiri saja," katanya.

Namun, Anas dan saksi kedua, Supriyanto, tidak melihat adanya instruksi atau provokasi Syihabudin pada saat peristiwa kerusuhan.

"Saya tidak tahu. Saya hanya ikut-ikutan," kata Supriyanto yang mengaku hanya kenal terdakwa ketika mengikuti pengajian.

Terdakwa Syihabudin (46) diduga mendalangi aksi perusakan beberapa fasilitas umum di Temanggung, pascasidang vonis kasus penistaan agama di PN Temanggung. Dalam kasus ini, Syihabudin didakwa Pasal berlapis, yakni Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Pasal 170 ayat 1 KUHP tentang pengrusakan dan pengroyokan.

Sedangkan tersangka lain dikenakan Pasal 170 ayat 1 KUHP. Mereka terancam hukuman enam hingga 12 tahun penjara.



Berita Utama
11 Maret 2011

Kasus Temanggung Disidangkan di Semarang

SEMARANG- Mahkamah Agung mengeluarkan perintah agar kasus kerusuhan Temanggung disidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Hal itu berdasarkan fatwa Mahkamah Agung (MA) nomor 034/KMA/SK/III/2011 yang ditandatangani Ketua MA Arifin H Tumpa.

Fatwa tersebut berisi perintah agar PN Semarang memeriksa dan memutus perkara pidana 25 tersangka kerusuhan Temanggung. Dalam pertimbangannya, MA hanya mencantumkan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng Sugeng Pudjianto membenarkan ihwal terbitnya fatwa MA tersebut. Pihaknya akan melakukan pengalihan persidangan ke PN Semarang. "Kami akan melaksanakan sesuai petunjuk dari Mahkamah Agung," katanya.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Djihartono menyatakan perintah itu disambut baik kepolisian. Persidangan di Semarang sesuai dengan keinginan Polda Jateng dengan alasan keamanan.

"Saat ini berkas di Kejati dan sudah dinyatakan lengkap. Tinggal menunggu kapan akan disidangkan," katanya.

Pengeroyokan Menurut Djihartono, tersangka kerusuhan Temanggung dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan perusakan. Mereka terancam hukuman lima tahun penjara. Namun khusus tersangka Syihabudin diancam dengan pasal penghasutan.

"Jadi ada perbedaan antara orang yang berbuat dengan yang bertindak sebagai orang yang menghasut dan mengajak warga untuk mendatangi persidangan dan berbuat pidana," jelasnya.

Kerusuhan Temanggung terjadi karena ketidakpuasan warga atas vonis lima tahun penjara dalam kasus penistaan agama dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan di PN Temanggung, 8 Februari lalu. Akibat kerusuhan tersebut sejumlah gereja dirusak, beberapa mobil dan motor dibakar. Kepolisian kemudian menetapkan 25 orang menjadi tersangka, termasuk Syihabudin yang diduga menjadi provokator sehingga terjadinya kerusuhan itu. (H68,H21-43)

Berita Utama
15 April 2011

Jaksa Bantah Rekayasa Dakwaan

- Sidang Kerusakan Temanggung

SEMARANG - Tim jaksa penuntut umum (JPU) membantah telah merekayasa dakwaan terhadap tersangka kerusakan Temanggung, Sihabudin. JPU juga menyampaikan bahwa penunjukan Pengadilan Negeri (PN) Semarang sebagai tempat persidangan kasus kerusakan itu sudah memenuhi prosedur.

Pernyataan itu dibacakan tim JPU dalam sidang lanjutan kasus kerusakan Temanggung di PN Semarang, Kamis (14/4). "Surat dakwaan disusun berdasarkan Pasal 143 ayat 2 KUHAP," kata Sugeng, salah satu JPU dari Kejaksaan Negeri Semarang.

Sugeng menjelaskan, dalam dakwaan sudah disebutkan secara lengkap identitas terdakwa, kronologi peristiwa, dan pasal yang didakwakan terhadap Sihabudin. "Dakwaan juga telah diuraikan secara cermat, tegasnya.

Sugeng membantah tudingan Sihabudin dan kuasa hukumnya yang menyebut surat dakwaan direkayasa, bahkan berisi fitnah. "Pada saat dibacakan dakwaan, meski mengatakan sebagian besar adalah fitnah, terdakwa menyatakan mengerti. Artinya dakwaan tidak kabur," jelasnya.

Sihabudin didakwa dengan dua pasal, yakni Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dan Pasal 170 ayat 1 KUHP tentang Pengrusakan dan Pengeroyokan.

Sesuai Prosedur Soal tempat persidangan yang dituding tidak memenuhi prosedur, JPU membeberkan sejumlah dokumen perizinan pemindahan lokasi sidang.

Dijelaskan, urat-surat yang diperlukan untuk pemindahan tempat sidang sudah lengkap. Penetapan tempat sidang atas seizin Mahkamah Agung melalui SK MA No.034/KMA/SK/111/2011.

Sebelumnya, kuasa hukum terdakwa Sihabudin, M Syahir, mengatakan PN Semarang tidak berwenang menyidangkan kasus ini. Sebab tempat kejadian perkara pada kerusakan 8 Februari lalu adalah di Temanggung. Hal itu berdasar Pasal 84, 147 dan 151 KUHAP.

Sementara itu, sidang kali ketiga kemarin diwarnai aksi unjuk rasa oleh belasan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Semarang. Mereka mengkhawatirkan adanya politisasi dalam penuntasan kasus kerusakan ini.

Aksi tersebut dilakukan di depan gerbang PN dan tidak mengganggu jalannya persidangan. Aparat kepolisian menjaga kompleks PN, meski tidak seketat sidang pertama dan kedua. (H68-43)



Berita Utama

09 Maret 2011

Lokasi Sidang Rusuh Temanggung Tunggu Fatwa Mahkamah Agung

SEMARANG- Lokasi peradilan 25 tersangka kasus kerusuhan Temanggung belum dapat dipastikan. Polisi masih menunggu fatwa dari Mahkamah Agung (MA).

Kapolda Jateng Irjen Edward Aritonang mengatakan, karena pertimbangan keamanan, pihaknya memilih persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang. Namun segala sesuatunya tergantung keputusan MA yang lebih berwenang.

“Kepolisian dan kejaksaan mengharapkan proses persidangan kasus rusuh Temanggung dapat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang, namun keputusan itu bukan wewenang kami,” kata Kapolda, Selasa (8/3) kemarin. Kapolda menjelaskan, pihaknya telah meminta fatwa ke Pengadilan Tinggi Jateng beberapa waktu lalu. Namun kejaksaan meminta agar fatwa tersebut langsung dimintakan ke MA. Saat ini pihaknya masih menunggu turunnya fatwa tersebut agar persidangan bisa segera dilakukan.

Menurutnya, saat ini situasi di Temanggung sudah kondusif. Meski begitu, pihaknya tidak mau mengambil risiko jika persidangan tetap digelar di sana. Saat ini seluruh pasukan Polda Jateng yang diperbantukan di Temanggung juga sudah ditarik. Tanggung jawab penanganan keamanan sudah diserahkan sepenuhnya ke Polres Temanggung.

Penghasutan

Kapolda juga menerangkan bahwa semua tersangka, kecuali Syihabudin, dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dan Perusakan.

“Khusus Syihabudin dijerat Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan,” katanya. Kerusuhan di Temanggung terjadi pascasidang vonis kasus penistaan agama dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan di Pengadilan Negeri Temanggung pada 8 Februari 2011. Bawengan dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Rusuh massa di daerah itu antara lain mengakibatkan kerusakan sejumlah gereja, kompleks sekolah Kristen, dan kendaraan bermotor.

Pada 12 Februari 2011 seluruh tersangka kerusuhan di Temanggung yang berjumlah 25 orang dipindahkan dari Mapolres Temanggung ke Mapolda Jateng (23 orang), dan Mapolrestabes Semarang (Syihabudin dan Lutfi Hakim Aziz). Pekan kemarin, Kejati Jateng menyatakan Polda telah melimpahkan berkas perkara dan telah dinyatakan lengkap atau P-21.

Dengan alasan keamanan juga, PN Semarang menyatakan keberatan jika harus menampung sidang kerusuhan Temanggung. Selain itu, beban PN Semarang saat

ini sudah demikian berat dengan menjadi tempat untuk pengadilan umum, pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Niaga sekaligus. “Beban kami sudah berat, satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk menyidangkan perkara Temanggung hanya ruang sidang utama, tapi itu berarti harus gantian dengan sidang tipikor,” kata Humas PN Semarang, Sugeng Hiyanto.

Meski demikian, jika nantinya MA memang menunjuk lokasi sidang di PN Semarang, menurut Sugeng pihaknya tetap akan melaksanakan perintah. Sebelumnya, Komisi A DPRD Jateng, Komisi A DPRD Temanggung, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mendesak agar proses persidangan bisa dilakukan di Temanggung. (H68,H23,H30-43)



Berita Utama

10 Februari 2011

Ormas Anarkis Bisa Dibubarkan

- Polisi Tetapkan 8 Tersangka : KWI: Jangan Balas Dendam

KUPANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan agar organisasi massa yang menciptakan keresahan ditindak tegas, jika perlu dibubarkan.

Namun, Presiden mengingatkan, pembubaran ormas harus melalui penyelidikan yang komprehensif. "Bila ada kelompok atau organisasi yang resmi namun membuat keresahan masyarakat dan mengakibatkan jatuhnya korban, maka aparat harus segera mencari jalan keluar sesuai dengan koridor hukum.

Kalau perlu, kelompok itu dibubarkan saja," tandas Presiden saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (9/2).

Pernyataan Presiden itu disampaikan terkait kasus kekerasan beruntun yang terjadi di Banten dan Temanggung. Dia mengkhawatirkan terjadi eksekusi yang lebih besar dari kejadian tersebut.

Karena itu, untuk mengantisipasi hal itu Polri dan TNI diinstruksikan agar berani mengungkap pemimpin dan penggerak kerusuhan antarumat seagama dan beda agama yang mendapat kecaman dari berbagai pihak tersebut. "Pelakunya harus mendapat sanksi hukum yang setimpal," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta juga menegaskan bahwa ormas yang bertindak anarkis bisa dibubarkan. Hal tersebut jelas sudah diatur dalam Undang-undang.

"Jadi, itulah yang sekarang sedang kita alami. Kita harus mengambil tindakan berdasarkan fakta," kata Mendagri usai rapat bersama Menkum HAM, Menteri Agama, Jaksa Agung dan Kapolri membahas SKB soal Ahmadiyah di kantor Kemenag, Rabu (9/2).

Menurut Gamawan, pembubaran ormas anarkis diatur dalam pasal 13 UU Keormasan dan pasal 18-27 PP No 18 tahun 1986. Ormas akan dibubarkan jika melanggar ketertiban umum, menerima bantuan asing yang menghasut untuk melakukan kerusuhan dan sebagainya. "Kita tengah mendalami itu semua," jelasnya.

Apakah sudah ada pelarangan dari Mendagri? "Belum, tapi ini akan kita alami dulu fakta-faktanya," tegas dia.

Jumlah Tersangka

Sementara itu, polisi kemarin menetapkan delapan orang sebagai tersangka pelaku kerusuhan yang merusak gereja dan perkantoran pemerintah di Temanggung, Selasa (8/2) lalu. Namun, tersangka kerusuhan yang melibatkan

banyak orang tersebut kemungkinan akan bertambah.

Kapolda Jateng Irjen Edward Aritonang di Polres Temanggung, kemarin menyebutkan, kedelapan pelaku itu dengan inisial NHY, SD, AS, MY, SF, AK, AZ, dan SM. Mereka yang telah ditahan tersebut, berasal dari sekitar kota Temanggung.

''Untuk keperluan penyelidikan, untuk sementara kami belum bisa menyebutkan secara lengkap identitas para tersangka. Kami masih akan mengusut pelaku-pelaku lain untuk mengungkap kasus ini,'' jelasnya.

Dia mengatakan, petugas menetapkan tersangka melalui berbagai sumber identifikasi, antara lain keterangan para saksi, rekaman kejadian dari aparat atau pihak lain, serta benda-benda yang ada di tangan pelaku. ''Untuk barang bukti belum dapat disimpulkan, akan tetapi dari beberapa pelaku ditemukan tameng-tameng polisi yang dirampasnya saat kejadian,'' tambahnya.

Dia mengungkapkan, para tersangka adalah orang-orang yang terlibat sebagai pelaku, membantu melakukan dan menyiapkan, atau turut serta dalam tindak perusakan tersebut. Adapun ketentuan hukum yang dijatuhkan kepada mereka ialah pasal 130 KUHP, tentang perbuatan secara bersama-sama melakukan perusakan terhadap benda atau barang. Ancaman hukumannya lima tahun penjara.

Kapolda meminta masyarakat agar dapat memahami dan mendukung langkah-langkah hukum yang sedang dijalankan aparat keamanan. Sebab, perbuatan perusakan tersebut sangat jelas dan bisa dilihat dengan kasat mata.

''Mari kita hargai proses hukum ini, kalau memang merasa tidak bersalah, silakan menggunakan pengacara untuk melakukan pembelaan. Kalau tidak, nanti akan kami carikan, karena ancaman hukumannya 5 tahun,'' jelasnya.

Dia mengungkapkan, situasi Temanggung saat ini sebetulnya sudah sepenuhnya normal. Namun demikian, aparat kepolisian dari Polda dan Polres Temanggung dan kabupaten sekitarnya dibantu TNI masih akan terus berjaga-jaga, terutama di kantor pemerintahan dan gereja, sampai dengan dipastikan situasi benar-benar normal.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Djihartono menambahkan, sebanyak 12 perusuh yang dianggap sebagai provokator kerusuhan di Temanggung kemarin diamankan ke Mapolda Jateng. Mereka dibawa ke Mapolda untuk diperiksa secara intensif. Delapan di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

''Hingga kini (semalam-Red) pemeriksaan masih terus dilakukan. Delapan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sebagian sudah ditahan. Saat ini seluruh pelaku yang diamankan sedang kami periksa secara intensif,'' kata Kombes Djihartono, Rabu (9/2) malam.

Dari hasil penyidikan, para tersangka mengakui telah melakukan perusakan

beberapa fasilitas negara dan umum, di antaranya papan nama pengadilan, sepeda motor, dan mobil polisi. Beberapa barang bukti yang diamankan antara lain batu dan kayu yang digunakan untuk merusak. Polisi juga menyita sebuah mobil yang digunakan para pelaku.

Keberadaan terdakwa penistaan agama Antonius Rechmond Bawengan saat ini dirahasiakan. Kabid Humas belum bisa menjelaskan keberadaan terdakwa dengan alasan menyangkut keselamatan yang bersangkutan.

Sementara itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Temanggung bersama dengan Bupati dan jajaran Muspida, kemarin mengadakan pertemuan di Kantor Bupati. Dalam pertemuan tersebut mereka menyatakan menyesalkan peristiwa kerusuhan dan pengerusakan di Temanggung dan berharap kejadian semacam itu tidak terulang kembali.

Selain itu, kerusuhan itu terjadi karena dipicu ketidakpuasan atas putusan pengadilan kepada terdakwa kasus penistaan agama Anthonius Richmord Bawengan, yang divonis 5 tahun penjara. Dengan demikian, bukan disebabkan pertentangan antaragama.

”Perilaku merusak bukanlah tabiat warga Temanggung. Menurut informasi mereka berasal dari beberapa daerah di luar Temanggung. Kita ini sebetulnya, hanya ketiban awu anget, seperti halnya ketika ada teroris di sini dulu,” kata Bupati Hasyim Afandi.

Sedangkan tokoh agama peserta pertemuan itu, Gus Masful, mengingatkan, agar aparat berhati-hati ketika ”mengambil” orang untuk diperiksa terkait kasus ini. Sebab, kecerobohan bisa jadi akan memicu respons yang berlebihan dari warga, dan menyebabkan situasi tidak kondusif. ”Ada baiknya, elemen masyarakat atau ormas, ikut diajak koordinasi,” tuturnya.

Di tempat terpisah, sejumlah kiai, ustad, dan santri Pondok Pesantren KH Murodi, Mranggen, Demak, mengutuk keras aksi pembakaran gereja dan sekolah di Temanggung. Mereka berpendapat tindakan itu dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Islam.

”Kami meminta Kepolisian untuk segera menangkap dan mengusut tuntas pelaku pembakaran serta aktor intelektualnya. Bawa mereka ke meja hijau untuk diadili. Tuntut sesuai KUHP, tidak usah takut sebab mayoritas umat Islam akan mendukung langkah-langkah Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus ini,” kata KH Abdul Cholid Murod LC MHum, selaku juru bicara.

Dia juga meminta agar Kementerian Agama memprakarsai silaturahmi antara tokoh-tokoh agama dan masyarakat di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan kota. Sebab, pada tingkat massa di bawah inilah yang saling berhadapan dan bersinggungan sehingga mudah tersulut oleh provokasi. ”Umat Islam jangan mudah terhasut dan melakukan perusakan, pembakaran, dan pembunuhan atas nama agama. Islam mengajarkan kasih sayang tanpa memandang agama, ras, gender, dan status sosial,” tandasnya

Seruan KWI

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Komisi HAK Koferensi Waligereja Indonesia (KWI) Antonius Benny Susetyo mengatakan, peristiwa amuk massa yang menghancurkan gereja di Temanggung, Jawa Tengah, harus dicegah dari aksi balas dendam yang berkepanjangan. Sebab, hal itu hanya akan menghancurkan sendi-sendi kerukunan umat beragama.

''Kami dari Gereja Katolik (KWI) menyerukan kepada umat, tidak boleh ada aksi balas dendam dengan melakukan apa saja, termasuk kekerasan. Kami jamin itu. Kami melihat ini adalah ulah oknum, bukan perbuatan umat beragama,'' kata Antonius Benny Susetyo kepada Suara Merdeka, kemarin.

Romo Benny yang juga anggota Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan Publik tersebut, menilai kekerasan berdalih agama dan dalih apapun timbul karena negara dan aparatnya gagal memberikan perlindungan yang optimal terhadap warganya. ''Pemerintah tidak menegakkan keadilan sebagaimana mestinya, sehingga memunculkan aksi main hakim sendiri,'' katanya.

Pembubaran

Ketua Setara Institute Hendaridi mengatakan, untuk menciptakan rasa aman warga dan pemenuhan hak konstitusional warga untuk bebas beragama/berkeyakinan, Setara Institute mengapresiasi rencana dan langkah Presiden untuk mengkaji dan menjajaki kemungkinan pembubaran organisasi masyarakat tertentu yang disampaikan di Kupang. ''Kami sangat mengapresiasi langkah Presiden,'' katanya.

Menurut dia, perlu terobosan hukum baru untuk dapat membubarkan atau membekukan ormas yang melakukan kekerasan. Terobosan yang dapat ditempuh adalah pertama-tama, aparat penegak hukum harus memeriksa pimpinan-pimpinan ormas yang diidentifikasi mengusung asipirasi intoleran dan aktif melakukan kekerasan.

Berikutnya, jika pelaku-pelaku ini terbukti dan memiliki kaitan secara kelembagaan, maka Presiden atas nama UU Ormas bisa merujuk pada fakta-fakta persidangan yang mengadili pelaku-pelaku kekerasan tersebut sebagai pertimbangan pembubaran Ormas.

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Asep Fajar Rahmat mengatakan, kehendak massa yang mendikte hakim agar menjatuhkan vonis sesuai dengan keinginannya bisa dikategorikan penghinaan terhadap pengadilan. ''Massa tidak boleh menekan hakim agar hukuman terhadap terdakwa sesuai selera mereka. Ini contempt of court,'' katanya di Jakarta, Rabu (9/2).

Komisi Yudisial, lanjut dia, juga sangat menyesalkan tragedi yang terjadi di Pengadilan Negeri Temanggung. Tindakan massa tersebut sangat mengancam independensi hakim.

Dia mengatakan, tidak hanya tragedi Temanggung. Peristiwa tembak menembak saat persidangan kasus perkelehaian grup preman di Pengadilan Jakarta Selatan, pihaknya juga memprihatinkan kasus tersebut. "Massa makin menunjukkan perilaku menekan," tegas Asep.

Komisi Yudisial, sangat berharap agar pemerintah memperhatikan situasi khusus seperti itu dengan memberikan pengamanan yang maksimal. "Pengamanan harus diberikan secara khusus pada hakim. Pengamanan harus memadai bagi hakim dan pengadilan. Juga harus dinormakan contempt of court secara komperhensif. Apapun kondisinya kami berharap agar hakim tetap menjalankan tugasnya secara profesional," tegasnya. (H24,H21, K5,F4,D3,H24-25,35)



Berita Utama
09 Februari 2011

Perusakan Tempat Ibadah Haram Hukumnya

SEMARANG- Tokoh agama dan sejumlah kalangan mengancam keras berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mengatasnamakan agama. Dua peristiwa beruntun, penyerangan jemaat Ahmadiyah di Banten dan perusakan tiga gereja di Temanggung membuktikan bahwa pemerintah telah gagal memenuhi hak atas kebebasan beragama di Indonesia. Selain itu, kurang tegasnya aparat penegak hukum dituding juga menjadi salah satu penyebab mudahnya emosi warga meletup menjadi tindakan anarkis.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng Ahmad Darodji menegaskan, kerusuhan dan perusakan tempat ibadah haram dilakukan. Begitu pula dengan perbuatan anarkis, tidak diperkenankan oleh agama. Menurutnya, aksi protes boleh saja dilakukan semua pihak, namun harus sesuai aturan dan tidak merusak.

“Masyarakat saat ini cenderung seperti sumbu pendek, mudah terprovokasi apabila melihat sesuatu yang dirasa tidak benar. Aparat penegak hukum harus tegas menindak pelaku yang bisa menyebabkan hal itu terjadi,” katanya. Menurutnya, penodaan terhadap agama tertentu seharusnya memang divonis sesuai kesalahan dan aturan yang ada dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Gereja Katolik mengancam keras kerusuhan yang menyebabkan kerusakan sejumlah gereja di Temanggung. Uskup Keuskupan Agung Semarang (KAS) Monsinyur Johannes Pujosumarta mengaku prihatin dan mengancam keras tindakan anarkis massa tersebut. Ia menuturkan, upaya pembakaran gereja bisa digagalkan setelah massa merusak bangunan dan isi gereja Santo Petrus-Paulus Temanggung.

“Kita dapat belajar bahwa tindak kekerasan dengan merusak milik orang lain bukan solusi yang cerdas untuk menyelesaikan masalah. Semoga akal budi yang sehat, hati nurani yang jernih tetap dapat menjadi pemandu diri kita dalam hidup bersama yang berakhlak mulia. Saya meminta semua pihak untuk menahan diri agar tidak membalas kekerasan dengan kekerasan,” jelas Romo Pujasumarta.

Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan KAS Romo Aloys Budi Purnomo terus berkoordinasi dengan para tokoh lintas agama agar berusaha menjaga situasi tetap kondusif dan tidak terprovokasi. Pihaknya prihatin mengingat kerusuhan itu terjadi di kota kecil seperti Temanggung yang memiliki iklim kondusif.

Terkaity dengan hal itu, Rabu (9/2) pagi ini pukul 10:00 para tokoh masyarakat lintas agama akan menggelar doa bersama di Gereja Hati Kudus Tanah Mas Semarang untuk saling menguatkan satu sama lainnya.

Organisasi lintas agama dan lembaga swasya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Forum Taman Hati juga mengancam peristiwa itu. Forum itu

beranggotakan 11 kelompok, yakni Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI), Padepokan Budi Aji, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Maranata Blabak, Padepokan Kawula Alit, Lakpesdam NU Jateng, LPP Sekar Jepara, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Komunitas Kandang Gunung, PMII Semarang, LSENSA Jateng, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang.

“Pemerintah telah membiarkan kekerasan terjadi. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM),” ungkap Direktur LBH Semarang, Siti Rakhma Mary Herwati.

Mamik dari PWKI Kudus menyerukan pada setiap elemen masyarakat untuk tidak mudah terpecah dan bermusuhan karena isu-isu agama, serta mengedepankan toleransi dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ketua DPD Partai Golkar Jateng Wisnu Suhardono meminta aparat kepolisian mengusut tuntas peristiwa tersebut serta melakukan tindakan hukum sesuai aturan. Wisnu berharap semua pihak tidak mudah terpancing isu-isu menyesatkan yang dapat mempengaruhi retaknya kerukunan beragama. “Apapun dalihnya, kekerasan terhadap umat beragama tidak benar dilakukan,” kata Wisnu.

Bertentangan dengan Alquran

KH Mahfudz Ridwan Lc, pengasuh Ponpes Edi Mancoro Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang mengutuk keras pembakaran dan perusakan gereja karena menodai sendi-sendi kerukunan beragama. Ia menilai ada indikasi kuat pihak tertentu merancang kerusuhan itu secara sistematis karena ada mobilisasi massa dari luar Temanggung.

“Tindakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan perilaku orang beriman. Bertentangan dengan Alquran, hadits, serta Pancasila. Polisi harus bertindak tegas dan keras kepada para perusuh dengan menegakkan hukum setegak-tegaknya,” katanya.

Meski pelaku mengatasnamakan agama, dia mengimbau kalangan nonmuslim tidak perlu khawatir. Sebab, kaum muslimin moderat dari kalangan pesantren NU akan terus mengembangkan persaudaraan lintas iman. Kecaman juga datang dari para tokoh lintas agama yang tergabung dalam wadah Paguyuban Peduli Bangsa (PPB) Purworejo. “Kasus di Temanggung ini bisa mengancam harmoni kehidupan umat beragama,” ujar Ketua PPB Purworejo Kiai Thoha Mahasin dalam siaran persnya, kemarin.

Tokoh PPB lainnya, Pendeta Petrus Mardianto berharap kasus Temanggung tidak melebar dan tidak membesar.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai tragedi pembunuhan jemaat Ahmadiyah di Pandeglang, Banten dan perusakan gereja di Temanggung sangat menyedihkan. Pemerintah tidak mampu memberikan rasa tenang dan aman kepada masyarakat. (H23,H68,J14,mad, H30, H43,di-59)

Hukum

10 Juni 2011

Perusuh Temanggung Dihukum Ringan

SEMARANG-Sebanyak 17 dari 25 terdakwa kerusuhan Temanggg menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (9/6). Satu terdakwa dihukum empat bulan penjara sementara 16 lainnya diputus selama lima bulan.

Di ruang sidang V, enam terdakwa divonis lima bulan. Mereka adalah Ahmad Faro'i, Agus Prihanto, Aziz Zaenal Arifin, Muhammad Syaiful Mujab, Abdul Kholik, dan Tarmudi. Di ruang sidang 2, terdakwa Muhaya, Muslih, Pariyo, Sofyanto, Nur Chotib, Lutfi Hakim Aziz juga dijatuhi vonis lima bulan. Vonis yang sama juga diterima dua terdakwa, Bambang Waluyo dan Anas Tahir yang disidang di ruang sidang 1, serta Samsudin dan Ihwan di ruang sidang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Masing-masing majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan kerusuhan setelah sidang vonis kasus penistaan agama di PN Temanggung, 8 Februari lalu. Akibatnya sejumlah gereja, sekolah dan kendaraan rusak berat. Perbuatan mereka terbukti melanggar Pasal 170 KUHP tentang perusakan secara bersama-sama. "Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan tindak perusakan sesuai dakwaan pasal 170 KUHP," kata hakim Ronius.

Sementara Suprihanto, terdakwa yang sebelumnya diduga menjadi salah satu otak kerusuhan Temanggung justru hanya divonis 4 bulan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 7 bulan penjara. Ketua majelis hakim Edi Tjahjono SH mengambil keputusan tersebut karena Suprihanto tidak ikut dalam kerusuhan dan hanya bertugas mencari massa. Perbuatannya melanggar pasal 56 ayat (1) KUHP jo pasal 160. Pasal ini mengenai perbuatan seseorang yang membantu terjadinya tindak kejahatan.

Pada 5 putusan tersebut, pertimbangan hakim hampir sama. Hal-hal yang memberatkan para terdakwa antara lain, perbuatan itu dinilai mengakibatkan kerusakan bangunan pada PN Temanggung, gereja, dan sekolah. Selain itu, para terdakwa juga telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di Kabupaten Temanggung. Hakim juga mempertimbangkan kenyataan para terdakwa belum pernah di hukum, bersikap sopan dan terus terang serta merupakan tulang punggung keluarga.

Usai mendengar keputusan hakim, sebanyak 17 terdakwa yang ditanyai satu persatu langsung menyatakan menerima. "Saya terima keputusan hakim," kata salah satu terdakwa Agus Prihanto. Sementara para jaksa penuntut belum mengambil sikap atau masih pikir-pikir.

Putusan tersebut dihitung ringan jika menilik tuntutan jaksa penuntut yang meminta hukuman 8 bulan penjara untuk 16 terdakwa dan 7 bulan penjara untuk

Suprihanto. Apalagi hukuman bakal dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani. Semua terdakwa mulai ditahan di Mapolda Jateng pada 12 Februari dan hingga kini sudah hampir empat bulan lamanya. Berarti untuk 16 terdakwa hanya akan menjalani hukuman lebih kurang selama 1 bulan. Terdakwa Suprihanto kemungkinan malah sudah akan bebas pada Minggu 12 Juni mendatang.

Hal ini menurut Meli Ekowati (30), istri Agus Prihanto, sangat melegakan. Kasus ini masih menyisakan 8 terdakwa lain termasuk terdakwa yang diduga dalang kerusuhan, Sihabudin. Rencananya, vonis akan dibacakan pada sidang Selasa (14/6). (H68, J14-80)



Berita Utama

29 April 2011

Saksi Melihat Sihabudin saat Kerusuhan

- Sidang Kasus Temanggung

SEMARANG- Para saksi yang dihadirkan dalam sidang kerusuhan Temanggung mengaku melihat terdakwa Sihabudin berada di tengah-tengah massa saat kerusuhan terjadi. Namun, mereka tidak bisa menyatakan apakah terdakwa melakukan penghasutan atau menjadi provokator aksi tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan kasus kerusuhan Temanggung di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (28/4). Jaksa penuntut umum (JPU) Sugeng SH menghadirkan 4 saksi dalam sidang tersebut. Mereka adalah 2 anggota kesatuan Sabhara Polda Jateng, Didit Indriawan dan Yusuf Setiawan, anggota Intelkam Polres Temanggung, Ganda Himawan, serta humas Polres Temanggung, Hadiyanto .

Keempatnya saat itu berada di lokasi kejadian. Mereka bertugas mengamankan sidang vonis kasus penistaan agama di PN Temanggung. Ketika sidang berlangsung, saksi Didit Indriawan mengaku melihat ratusan orang mengepung gedung PN Temanggung. Massa yang awalnya cuma beteriak-teriak itu langsung mengamuk begitu hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Antonius Richmond Bawengan.

“Massa mengamuk di luar gedung dan berusaha masuk ruang sidang. Mereka juga merusak mobil Baracuda milik kepolisian yang digunakan untuk mengamankan terdakwa,” kata Didit di hadapan Ketua Majelis Hakim Edy Tjahjono.

Kamera Video

Aksi amuk itu direkam oleh Ganda Himawan, anggota Intelkam Polres Temanggung menggunakan kamera video sekitar 40 menit. Ganda mengaku melihat terdakwa Sihabudin ada di tengah-tengah massa yang rusuh. Namun dia tidak mengetahui apakah Sihabudin memprovokasi massa tersebut atau tidak. “Saya ambil gambar dari lantai dua gedung PN Temanggung. Dalam rekaman video yang saya ambil, terdapat gambar terdakwa namun saat itu tidak sedang melakukan penghasutan,” katanya.

Selain saksi, sidang yang berlangsung 4 jam itu juga menghadirkan sejumlah barang bukti. Di antaranya balok-balok kayu, baik yang masih utuh atau yang sudah terbakar, papan nama Gereja Bethel Indonesia, pecahan kran air milik Gereja Santo Petrus, rambu lalu-lintas, pecahan kaca gereja, dua buah boks kayu, sebuah bangku panjang gereja, dan megaphone milik pengunjuk rasa.

Kesaksian itu, menurut Muhammad Syahir, pengacara Sihabudin, sama sekali tidak memberatkan kliennya. Sebab, para saksi tidak bisa menunjukkan bukti penghasutan dan provokasi yang didakwakan kepada Sihabudin.

“Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan terdakwa, termasuk

apakah melakukan penghasutan dan perusakan sehingga klien kami tidak bisa dijerat dengan Pasal 160 dan 170 KUHP,” katanya. Sidang akan dilanjutkan Kamis (5/5) pekan depan, dengan agenda mendengar keterangan saksi.(H68-35)



Berita Utama

23 Juni 2011

Syihabudin Dipindah ke Temanggung

TEMANGGUNG- Dua puluh lima terpidana kasus kerusuhan Temanggung dipindah ke rumah tahanan di kota itu, Rabu (22/6) malam. Sebelumnya mereka empat bulan ditahan di sel Mapolrestabes Semarang.

Para terpidana tiba di Rutan Temanggung sekitar pukul 20.30. Mereka dibawa dengan dua mobil tahanan Polda Jateng. Syihabudin, yang dianggap sebagai penghasut kerusuhan, dan Lutfi diangkut dengan mobil terpisah.

Berbeda dari para terpidana lain, keduanya dimasukkan ke rutan tanpa tangan diborgol. Satu peleton anggota Polres Temanggung dikerahkan untuk berjaga di sekitar rutan. Aparat bersiaga sejak pukul 19.30. Istri dan sejumlah kerabat Syihabudin menunggu di halaman rutan. Proses pemindahan berlangsung aman. Tak terlihat pengerahan massa.

Setibanya di rutan, para terpidana dikumpulkan di aula untuk diberi pengarahan. Menurut Kepala Rutan Temanggung Sambiyono, seluruh terpidana akan ditahan terpisah. Mereka ditempatkan di blok khusus narapidana yang masa penahanannya kurang dari satu tahun.

“Mereka kami tempatkan terpisah dari tahanan lain karena perlu pembinaan khusus,” ujarnya. Dia juga berpesan kepada para terpidana agar senantiasa menjaga suasana kondusif rutan.

Persoalan Politik

Pengacara terpidana, Muhammad Sahir menjamin pemindahan itu tidak akan menimbulkan gejolak keamanan di Temanggung. “Saya jamin itu tidak akan terjadi, saya sendiri yang jadi jaminannya. Sebelum mengajukan permohonan pemindahan, saya sudah berkoordinasi dengan Syihabudin agar jangan sampai ada pengerahan massa,” tandasnya.

Ketika dimintai tanggapan, Syihabudin menolak dirinya disebut provokator. Dia menganggap hukuman yang dijatuhkan padanya tidak mencerminkan asas keadilan.

“Banyak kepentingan yang bermain dalam kasus yang menimpa kami. Tidak hanya ranah hukum, tapi juga menyangkut persoalan politik,” ujarnya. Dia tidak mengajukan banding karena merasa langkah itu justru akan memperberat hukumannya.

Menurut catatan Suara Merdeka, rata-rata terpidana tinggal menjalani hukuman sekitar 17 hari. Khusus Syihabudin yang dipersalahkan sebagai provokator, masih harus menjalani sisa hukuman sekitar enam bulan dari vonis 1 tahun penjara. (J1-59)

Berita Utama

22 Juni 2011

Syihabudin Tidak Jadi Banding

SEMARANG- Meski sempat mengungkapkan rasa tak puas atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang pekan lalu, Syihabudin akhirnya sepakat menerima vonis satu tahun penjara. Terdakwa penghasut kerusuhan Temanggung itu tidak jadi mengajukan banding.

Ada beberapa pertimbangan yang membuat Syihabudin batal mengajukan banding, di antaranya kemungkinan vonis hakim di Pengadilan Tinggi (PT) bisa saja lebih berat daripada pengadilan tingkat pertama. Apalagi kasus Syihabudin mendapat banyak sorotan.

Menurut majelis hakim, Syihabudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di muka umum, yakni penghasutan dengan lisan supaya orang lain melakukan pengrusakan.

Kerusuhan Temanggung dilatarbelakangi ketidakpuasan massa atas vonis majelis hakim terhadap pelaku penistaan agama Antonius Richmond Bawengan yang diganjar hukuman lima tahun penjara.

''Secara normatif seorang hakim harus independen, tapi fakta di lapangan sering terjadi adanya pengaruh dari unsur lain termasuk faktor politis,'' kata kuasa hukum Syihabudin, M Syahrir, yang mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Selasa (21/6) kemarin.

Gatal

Syahir juga mengungkapkan keinginan Syihabudin untuk bisa dipindahkan secepatnya ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Temanggung. Selama ditahan sejak pertengahan Februari lalu, pengasuh Ponpes Al-Hadist Temanggung itu menginap di Polrestabes Semarang.

Syahir menegaskan, kliennya sudah tidak betah berada di tahanan Polrestabes karena fasilitas air yang tidak memadai. ''Fasilitas air di Polrestabes Semarang dikeluhkan klien kami karena membuat badannya gatal-gatal serta rambut yang semakin rontok akibat air yang tidak bersih. Sepertinya Syihabudin tidak cocok dengan air di sini,'' jelas Syahir.

Ia berharap, ke-25 terpidana kerusuhan Temanggung bisa dipindahkan ke LP Temanggung mengingat faktor jarak yang jauh, sekitar 80 kilometer dari Semarang, membuat keluarga kesulitan untuk menjenguk.

''Jika tidak mengajukan banding, maka putusan PN Semarang akan segera berkekuatan hukum tetap (incracht). Kalau sudah incracht, beliau (Syihabudin-red) bisa segera dipindahkan ke LP Temanggung,'' ungkapnya.

Terpisah, juru bicara PN Semarang Sugeng Hiyanto mengungkapkan, pengacara Syihabudin sudah mencabut pernyataan banding. Namun, masih ada kesempatan sampai Rabu (22/6) jika pengacara atau jaksa berubah pikiran.

Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jateng, Sugeng Pudjianto mengatakan,

segera setelah vonis yang dijatuhkan majelis hakim berkekuatan hukum tetap, kejaksaan akan memindahkan Syihabudin. (J14-43)



Berita Utama

10 Februari 2011

Tokoh Agama Waspadai "Serangan Balik"

- Terkait Insiden di Pandeglang dan Temanggung

JAKARTA- Tokoh lintas agama diminta tidak terpengaruh upaya adu domba dari pihak yang tidak menyukai mereka, menyusul kritik tentang kebohongan pemerintah belum lama ini.

Tokoh lintas agama juga perlu mewaspadai "serangan balik" yang memanfaatkan insiden penyerangan jemaat Ahmadiyah di Banten dan kerusuhan di Temanggung.

"Pasti banyak sekali pihak yang merasa tidak enak dengan penilaian tajam (dari tokoh lintas agama) tersebut. Siapa tahu ada counter attack (serangan balik-Red)," ungkap Presiden Konferensi Dunia Agama untuk Perdamaian (World Conference on Religion and Peace/ WCRP) KH Hasyim Muzadi, kemarin.

Mantan ketua umum PBNU itu mengingatkan para pemimpin keagamaan agar menyadari bahwa tokoh lintas agama bersama beberapa LSM baru saja melakukan koreksi sangat tajam terhadap pemerintah. Karena itu, dia menyerukan kepada seluruh umat beragama agar tetap bersatu dan mewaspadai adu domba serta perusakan kehormatan dan nama baik umat beragama.

Sebaliknya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum justru mencurigai aksi kerusuhan bernuansa agama itu bertujuan mendelegitimasi pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan demokrasi, dengan cara merusak keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu Anas mendesak aparat intelijen meningkatkan daya deteksi dan antisipasi terhadap potensi kekerasan.

"Juga harus diselidiki kemungkinan ada pihak yang mendorong kekerasan untuk merusak keamanan dan ketertiban publik, yang diarahkan untuk mendeligitimasi pemerintah," ujar Anas.

Tentang kasus Temanggung, Anas mengecam keras penistaan agama dalam bentuk apa pun, oleh siapa pun dan kepada agama apa pun. "Tidak ada alasan yang membenarkan penistaan agama," tandasnya.

Dia juga menyesalkan tindakan anarkis dan perusakan gereja serta sarana publik di kota itu. Menurutnya, atas nama dan alasan apa pun, anarki dan perusakan tidak dapat dibenarkan.

Mantan ketua umum PB HMI itu juga menyerukan agar seluruh umat beragama tidak terpancing provokasi dan hasutan yang tidak bertanggung jawab.

SBY Abai

Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menilai, Presiden SBY kesulitan menjaga kerukunan umat beragama. Dikatakannya, konflik yang dipicu persoalan Ahmadiyah dan kerusuhan di

Temanggung bukan hanya menjelaskan pudarnya peran pemerintah dalam membangun rasa aman di tengah masyarakat, namun juga merupakan gambaran krisis kewibawaan pemerintah di mata rakyat.

"Pemerintahan SBY cenderung abai dalam mengantisipasi konflik sosial dan membiarkan akar pemicu konflik tidak tersentuh secara benar, termasuk abai dalam mengupayakan penegakan hukum," ujarnya.

Menurutnya, berbagai risiko sosial mudah tersulut akibat meluasnya kegamangan dan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Menurutnya, konflik sosial juga dipicu lemahnya kepemimpinan SBY dalam mengangkat taraf kehidupan rakyat.

"Sementara SBY lebih menyibukkan diri pada efektivitas pencitraan atau hanya terombang-ambing dalam hiruk-pikuk politik nasional, sehingga kesengsaraan hidup rakyat memuncak dalam bentuk kerusuhan di mana-mana," kata mahasiswa program doktoral Universitas Indonesia itu.

Syahganda menegaskan, SBY harus bekerja lebih keras untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang kini dihindangi frustrasi sosial dan ekonomi agar pemerintahannya berjalan lancar.

"Jika tidak, SBY akan terus tersandera berbagai kesulitan dan tidak akan bisa keluar dengan selamat, termasuk boleh jadi terganggu secara serius untuk sampai 2014 nanti," tandasnya. (di-59)

Berita Utama
18 Februari 2011

Tiga Kerusuhan Tak Saling Terkait

SEMARANG - Pemerintah dan aparat kepolisian masih menyelidiki kasus kerusuhan bernuansa agama di tiga provinsi untuk mengetahui apakah ada keterkaitan satu sama lain.

Dari komunikasi para menteri dengan kepala daerah dan kepolisian di Pandeglang, Temanggung, dan Pasuruan, sejauh ini belum ditemukan keterkaitan itu.

“Penggalian kami dari tiga lokasi itu belum ada keterkaitan, karena kasusnya berbeda. Semoga saja tidak ada link dalam ketiga peristiwa tersebut,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto usai memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Jateng di kantor gubernur Jateng, Kamis (17/2).

Dikatakannya, latar belakang kerusuhan Pandeglang, Temanggung, dan Pasuruan berbeda. Penyerangan pesantren di Pasuruan ternyata telah kerap terjadi sebelumnya akibat perbedaan pandangan antarkelompok. Menurut Djoko Suyanto, pihaknya juga masih menyelidiki dugaan keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam peristiwa di tiga daerah tersebut.

Mengenai pernyataan Presiden SBY tentang pembubaran ormas, menurutnya ketika itu presiden menjelaskan bahwa setiap organisasi yang melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan bisa dibubarkan atas dasar UU.

“Pembubaran ada aspek legalnya, dan itu harus dibaca lengkap. Jangan hanya diartikan bahwa presiden hendak membubarkan ormas. Namun demikian saya kira semua kalangan tidak menginginkan ormas yang anarkis,” ujarnya didampingi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Jateng Bibit Waluyo, dan Kapolda Irjen Edward Aritonang.

Aspek legal yang dimaksud Menkopolhukam adalah UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan bahwa yang disampaikan presiden sudah sangat jelas. Namun masyarakat lebih memfokuskan seolah-olah pernyataan presiden tersebut hendak membubarkan ormas. Dikatakannya, UU yang mengatur ormas tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan PP No 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No 8 Tahun 1985.

Jemaat Ahmadiyah Tersangka Menyangkut kasus Ahmadiyah, penyidik Polri menetapkan salah satu jemaat Ahmadiyah, Deden Sudjana sebagai tersangka

kasus penyerangan di Cikeusik, Pandeglang. Direktur I Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Agung Sabar Santoso mengatakan, Deden belum ditahan.

Namun Agung enggan membeberkan peran Deden dalam kasus itu dan pasal yang disangkakan kepadanya. Seperti diketahui, Deden merupakan salah satu dari belasan anggota jemaat Ahmadiyah yang datang dari Jakarta ke Cikeusik.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Boy Rafli Amar mengungkapkan, pihaknya masih menelusuri penyebab penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah tersebut. “Nanti akan terungkap dalam pemeriksaan secara tuntas.” (H23,H30,K24-59)



Berita Utama

25 Mei 2011

Syihabudin Tuding Ba'asyir Terlibat Kerusuhan Temanggung

SEMARANG- Salah satu terdakwa kasus kerusuhan Temanggung, Syihabudin, menyebut banyak kelompok lain dari luar daerah yang berada di lokasi kejadian. Di antaranya kelompok Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) pimpinan Abu Bakar Ba'asyir.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Selasa (24/5), Syihabudin mengatakan massa yang berada di sekitar PN Temanggung sebelum kerusuhan terjadi pada 8 Februari lalu berjumlah ribuan. Sedangkan orang-orang yang dibawanya hanya 50-an.

“Banyak sekali. Kalau dari Temanggung, saya kenal tokoh-tokohnya. Tapi ini saya tidak tahu, hanya kenal dari bajunya,” katanya.

Syihabudin menyebutkan beberapa organisasi yang dia kenali dari atributnya, selain JAT, adalah Majelis Mujahidin Indonesia dan Gerakan Pemuda Kabah (GPK). Syihabudin adalah Ketua Wilayah GPK Temanggung. Namun dalam peristiwa itu, dia mengaku tidak menggerakkan orang-orang GPK.

“Saya tahu JAT itu milik (Abu Bakar) Ba'asyir dan MMI kepunyaan Irfan Awwas, tapi saya tidak pernah berhubungan dengan mereka, “ katanya.

Massa yang ditengarai berasal dari luar Temanggung itu datang untuk menyaksikan sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Antonius Richmond Bawengan. Massa menjadi beringas begitu mengetahui terdakwa “hanya” divonis lima tahun sesuai ancaman maksimal.

Menenangkan Massa

Menurut Syihabudin, pengunjuk yang ada di luar gedung mulai melempari ruang sidang dengan batu. Situasi semakin tak terkendali setelah ada desas-desus salah satu kiai terkena peluru polisi.

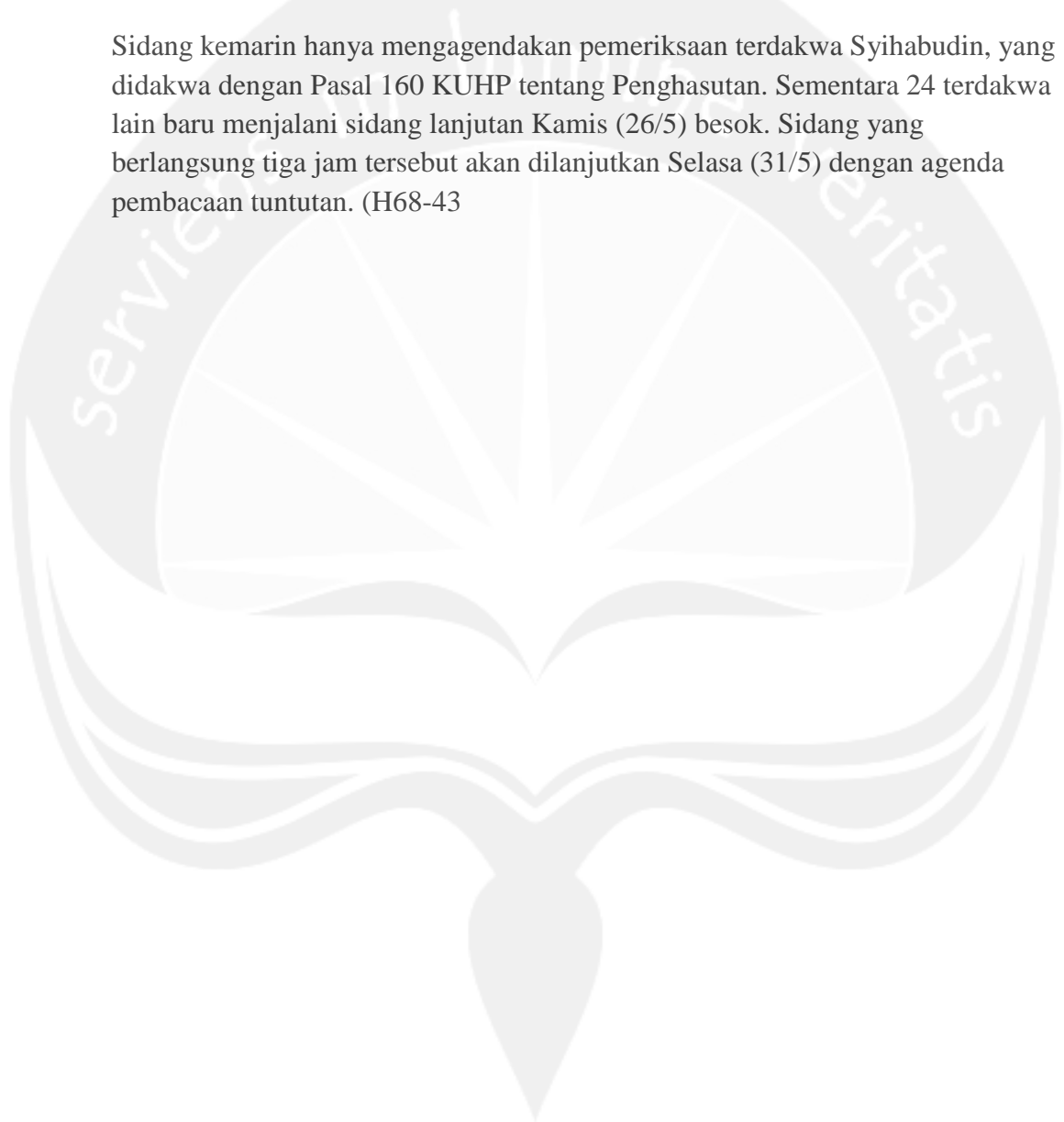
“Massa sudah ricuh tapi belum sampai bakar-bakaran. Lalu saya dengar ada kiai tertembak. Untuk memastikan, saya ke Polres Temanggung dan sempat ditemui Kapolres sebentar. Katanya polisi akan bertanggungjawab jika ada yang terluka,” ceritanya. Ketika Syihabudin balik dari polres, pembakaran gereja dan kendaraan sudah terjadi. Oleh karena itu, dia menolak dituding sebagai biang kerusuhan.

“Saya tidak pernah memerintahkan untuk rusuh, bahkan saya bersama polisi mencoba menenangkan massa. Saya teriak-teriak dengan pengeras suara tapi

tidak didengar,” katanya di hadapan majelis hakim yang diketuai Edy Tjahjono serta hakim anggota Dolman Sinaga dan Wiwik Suhartono.

Syihabudin juga menolak disebut sebagai penyebar SMS bernada menghasut untuk menyerbu PN Temanggung. Menurutnya SMS itu ditujukan kepada jamaahnya untuk datang ke pengajian. Syihabudin tetap mengelak meski hakim sudah mengingatkan bahwa pada SMS terdapat kalimat untuk datang ke PN Temanggung.

Sidang kemarin hanya mengagendakan pemeriksaan terdakwa Syihabudin, yang didakwa dengan Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan. Sementara 24 terdakwa lain baru menjalani sidang lanjutan Kamis (26/5) besok. Sidang yang berlangsung tiga jam tersebut akan dilanjutkan Selasa (31/5) dengan agenda pembacaan tuntutan. (H68-43



Berita Utama
23 April 2011

Terdakwa Kerusakan Temanggung Tetap Disidang di PN Semarang

SEMARANG- Pengadilan Negeri (PN) Semarang akhirnya diputuskan tetap menjadi lokasi sidang kasus kerusakan Temanggung. Hal itu sesuai putusan sela majelis hakim yang menolak eksepsi terdakwa pada sidang Kamis (21/4) lalu.

Majelis hakim untuk tersangka Sihabudin, Edy Tjahyono, mengatakan, penunjukan PN Semarang sebagai lokasi sidang sah dan sesuai peraturan. "Keputusan Mahkamah Agung terkait lokasi persidangan tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Edy.

Majelis juga menyatakan eksepsi terdakwa terkait kaburnya dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tidak beralasan. Menurutnya, dakwaan JPU telah sesuai Pasal 1 Ayat 3 KUHAP. Uraian yang ada pun sudah jelas, cermat, dan tepat. PN Semarang berwenang melaksanakan persidangan kasus kerusakan Temanggung dan akan melanjutkannya hingga vonis akhir.

Banding

Atas keputusan tersebut, tim pengacara terdakwa berencana mengajukan banding. Salah satu anggota tim pengacara terdakwa, Anis Priyo Anshori, bersikukuh jika PN Semarang tidak berwenang menyidangkan kasus kerusakan Temanggung. "Keputusan majelis hakim melanggar KUHAP," katanya. Menurut dia, ada beberapa kejanggalan dalam penanganan kasus kerusakan Temanggung, di antaranya adalah proses pengajuan pemindahan lokasi persidangan ke Mahkamah Agung.

Ia juga menduga kepolisian mempunyai kepentingan dalam penanganan kasus kerusakan Temanggung.

Menurutnya, majelis hakim tidak mempunyai kapasitas untuk mengubah UU terkait dengan lokasi persidangan. UU menyebutkan bahwa sidang harus dilaksanakan oleh pengadilan di mana peristiwa tersebut terjadi.

"Dengan adanya putusan ini, KUHAP telah diubah oleh majelis hakim," ujarnya. Sidang dilanjutkan Kamis (28/4) depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. (H68-43)